

# PERAN KAPITAL DAN GAGALNYA KONSOLIDASI DEMOKRATIS INDONESIA: PENDEKATAN EKONOMI-POLITIK

*The Role of Capital and The Failure of Indonesia's Democratic Transition:  
A Political-Economy Approach*

**Poltak Partogi Nainggolan**

Peneliti Utama Bidang Masalah Hubungan Internasional  
Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
Alamat email: pptogin@yahoo.com.

Naskah Diterima: 14 Januari 2016

Naskah Direvisi: 3 Mei 2016

Naskah Disetujui: 19 Mei 2016

## **Abstract**

*The failure of having a proper understanding on the prospect of Indonesia's democratization has been discussed in this essay. Applying a political economy approach, the writer presents a critical analysis on the development of political situation in post-Soeharto Indonesia. He criticized institutionalists, particularly Indonesianists, in preserving their point of views in understanding the country's politics in post-colonial era. Rather than institutionalism, the political economy approach, the writer argues, is more helpful in giving clear explanations why capital or money politics more dominantly influences the Indonesian politics after 1998, which eventually causes its failure in realizing democratic consolidation several years afterwards. The writer offers 'a socialist solution' to the western practices of liberal democracy and its capitalist development model, in addition to neo-liberalism, neo-feudalism, and its new form of oligarchy in new emerging democracies such as Indonesia. Therefore, the solution to the problems of politics and power in Indonesia will be no longer artificial in nature, but it can effectively address the roots of the problem.*

*Keywords: democratic consolidation, Indonesian politics, capital role, capital domination, money politics, political representation, institutionalism, political economy.*

## **Abstrak**

Kegagalan dalam memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap prospek demokratisasi di Indonesia telah dipertanyakan dalam tulisan ini. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi-politik, penulis mempresentasikan sebuah analisis kritis mengenai perkembangan politik di Indonesia pasca-Soeharto. Penulis mengkritik para institusionalis, khususnya Indonesianis, yang mempertahankan cara pandang mereka dalam memahami Indonesia. Dibandingkan dengan institusionalisme, pendekatan ekonomi politik, menurut penulis, lebih menolong dalam memberikan penjelasan yang lebih baik mengapa modal atau politik uang semakin dominan mengontrol perkembangan politik Indonesia pasca-1998, sehingga telah menyebabkan kegagalannya dalam mewujudkan konsolidasi demokratis dalam beberapa tahun sesudahnya. Penulis mengemukakan mengenai pentingnya sebuah solusi sosialis atas praktek demokrasi liberal Barat dan model pembangunan kapitalisnya, serta neo-feodalisme, neo-liberalisme, dan bentuk-bentuk baru oligarki yang muncul di negara demokrasi baru seperti Indonesia. Dengan demikian, solusi terhadap permasalahan sistem politik dan kekuasaan di Indonesia tidak lagi bersifat institusional di permukaan, namun efektif menjawab akar permasalahannya.

Kata kunci: konsolidasi demokratis, politik Indonesia, peran kapital, dominasi modal, politik uang, perwakilan politik, institusionalisme, ekonomi politik.

## A. Pendahuluan

Dalam waktu kurang dari sebulan, penulis menghadiri dua presentasi dari dua pihak yang berbeda, namun dengan topik terkait satu dengan lainnya, mengenai perkembangan demokrasi Indonesia, pelembagaan (*sic!*), dan kepemimpinan politik. Yang pertama, pada 27 April 2015, adalah presentasi makalah Puskapol UI dengan judul “Reformasi Sistem Perwakilan Politik Indonesia” dan yang kedua, pada 20 Mei 2015, presentasi makalah dosen senior Jurusan Ilmu Politik UI, Arbi Sanit, berjudul “Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia.” Keduanya dipresentasikan di Aula Juwono Sudarsono, FISIP-UI, Depok. Kajian dan presentasi ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi perwakilan politik Indonesia dewasa ini, yang tidak disertai dengan publisitas, namun sangat positif dilakukan, karena dihadiri civitas academica FISIP UI dan aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Presentasi pertama merupakan bagian dari pemaparan hasil riset Puskapol, sementara yang kedua, dalam tradisi ilmiah universitas di Barat dikenal sebagai *General Studium*, atau Kuliah Umum.

Makalah Puskapol membahas masalah politik nasional yang ada saat ini, khususnya DPR, dan kontestasi antar-koalisi; Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Selanjutnya, Puskapol membahas kegagalan partai politik dalam mengembangkan demokrasi dan mendorong terwujudnya konsolidasi demokratis, dan mengatasi krisis ideologi partai politik di era reformasi. Kajiannya berujung pada kesimpulan bahwa semua masalah itu penyebab krisis keterwakilan politik dan kinerja parlemen (DPR), karena: (1) telah muncul kepemimpinan yang elitis dan sentralistik dalam partai politik, yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan; (2) telah muncul terciptanya faksionalisme yang menguatkan struktur oligarki warisan lama; (3) telah sirnanya ideologi yang menyebabkan absennya agenda nasional partai politik, yang seharusnya menjadi pendulum kebijakan; (4) hadirnya basis rekrutmen partai yang sempit; dan (5) matinya debat kritis dalam partai, sehingga keputusan sepihak pimpinan partai dijadikan senjata untuk

menyingkirkan faksi yang berbeda. Banyak referensi dari Indonesianis (akademisi atau pengamat) asing dan nasional yang digunakan sebagai basis analisis, dari kalangan klasik seperti Herbert Feith<sup>1</sup> dan Lance Castle,<sup>2</sup> dan yang terkini seperti Stephen Sherlock,<sup>3</sup> Marcus Mietzner,<sup>4</sup> Andreas Ufen,<sup>5</sup> Vedy R. Hadiz,<sup>6</sup> Syamsudin Haris<sup>7</sup> dan Tomi Legowo,<sup>8</sup> walaupun dalam penilaian tertentu ada yang belum tentu tepat dan relevan. Karena, dasarnya, atau sejak awal pisau analisisnya masih menggunakan institusionalisme, ataupun yang sudah masuk dalam kategori institusionalisme baru (neo-institutionalism), yang mengombinasikannya dengan pendekatan perilaku (behavioral approaches), tidak mengherankan, rekomendasi yang diberikan hanya fokus di permukaan, atau bukan sesuatu yang baru. Juga, rekomendasi yang diberikan mengungkap hal-hal yang sudah sering dikemukakan, terutama dalam diskusi di media

<sup>1</sup> Lihat, Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Equinox Publishing, 2006.

<sup>2</sup> Herbert Feith and Lance Castle. *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Ithaca: Cornell University Press, 1970.

<sup>3</sup> Stephen Sherlock, *The Indonesian Parliament after Two Elections: What Has Really Changed?* Canberra: CDI, 2007. Lihat juga karyanya, “The Parliament in Indonesia’s Decade of Democracy: People’s Forum or Chamber of Cronies?,” dalam Marcus Mietzner and Edward Aspinall (eds.). *Problems of Democratization in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2010.

<sup>4</sup> Misalnya, Marcus Mietzner and Edward Aspinall (eds.), *ibid.*

<sup>5</sup> Andreas Ufen, “From *aliran* to dealignment: political parties in post-Suharto Indonesia.” *South East Asia Research*, 16, 2008, No.1: 5-41; Andreas Ufen. “Party systems, Critical Junctures, and Cleavages in Southeast Asia.” *Asian Survey*, Volume, 01, 2012, 52, No.3: 441-464.

<sup>6</sup> Vedy R. Hadiz, *Dinamika kekuasaan: ekonomi politik Indonesia pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 2005; Vedy R. Hadiz, “The Rise of Capital and the Necessity of Political Economy.” *Journal of Contemporary Asia*, 05/2013; 43(2); Vedy R. Hadiz and Richard Robison, “The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia,” *Indonesia*, Vol. 96, October 2013: 35-58.

<sup>7</sup> Syamsuddin Haris. “Sistem Proporsional yang Disempurnakan bagi Pemilu 1999.” kertas kerja, pada Dialog Nasional, “Agenda Pemilu: Visi, Tantangan, dan Prospek,” di UI, 20-21 Juli 1998, dan karya-karya lainnya.

<sup>8</sup> Tomy A. Legowo, “Disparitas Hubungan Parlemen dan Aspirasi Rakyat,” kertas kerja, 2011; Legowo, Tomy A. Legowo, “Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik.” *Jurnal Jentera*, Edisi 16, Tahun IV, April-Juni 2007.

massa, misalnya, dominasi fraksi harus dikurangi, anggota DPR harus diberikan kesetaraan hak dalam pemilihan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), serta relasi fraksi dan partai harus diperbaiki.

Sementara itu, presentasi Arbi Sanit berangkat dari sejarah politik Indonesia, yang mampu mengungkap jatuh bangun dan kematian demokrasi di era Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba), serta pengembangan ideologi, dan kemudian berusaha menjelaskan pelembagaan, kepemimpinan politik dan prospek demokrasi di Indonesia. Arbi masih dominan dengan pisau analisis institusionalisme,<sup>9</sup> walaupun kajiannya dilengkapi dengan literatur strukturalis dan mereka yang memakai perspektif budaya- dan ekonomi-politik. Tidak heran, kajiannya masih terbatas dalam menganalisis realitas politik yang berkembang, dan belum mengontruksikan masalah secara komprehensif dan terlihat koneksinya satu dengan lain, karena analisis ekonomi-politik-nya tidak dieksplorasikan. Sebagai konsekuensinya, yang menonjol masih analisis institusionalismenya, melalui referensi yang tidak bisa beranjak dari karya-karya klasik Herbert Feith,<sup>10</sup> Daniel S. Lev,<sup>11</sup> Samuel P. Huntington,<sup>12</sup> dan Arend Lijphart.<sup>13</sup> Sementara, karya-karya Samuel P. Huntington,<sup>14</sup> Richard Robison,<sup>15</sup> Andrew Macintyre<sup>16</sup> dan Yoshihara

Kunio,<sup>17</sup> dan Jeffrey A. Winters,<sup>18</sup> yang telah mencoba melihat kaitan pembangunan ekonomi Indonesia dengan struktur elit dan konstelasi politik yang tercipta, dengan telaah implikasi perkembangan sejarah kapitalisme di negeri ini, tidak dibahas lebih jauh. Memang ada karya (artikel) M. Dawam Rahardjo yang digunakan, namun itu dalam hubungannya dengan prospek ideologi nasional.<sup>19</sup> Padahal, ilmuwan tersebut memiliki (kumpulan) karya yang jauh lebih relevan untuk dijadikan referensi, yang terbit jauh lebih awal, tiga dasawarsa sebelumnya, yakni *Esei-esei Ekonomi Politik*,<sup>20</sup> yang sudah dapat dipakai untuk melihat arah perubahan sosial-politik di Indonesia dalam era Orba dan pasca-Soeharto.

Sehingga logis, sebagaimana kajian Puskapol, kajian Arbi mengenai kondisi politik Indonesia dewasa ini, tampak seperti sesuatu yang sudah diketahui umum. Itulah sebabnya, para peserta diskusi kajian Puskapol mengomentarnya dengan menggunakan ungkapan Prancis, *déjà vu*,<sup>21</sup> namun mereka juga sebenarnya belum mampu untuk menjelaskan, mengapa realitas politik Indonesia, terutama masalah kelembagaan (institusi), kepemimpinan, dan perwakilan politik, begitu karut-marut. Akibatnya, kita tidak bisa berkontribusi pada upaya memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap realitas yang tengah berlangsung dan berkembang, yang memperburuk kualitas demokrasi kita.

Karena itulah, tulisan ini bertujuan menjelaskan mengapa kita selalu gagal untuk dapat memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap perkembangan demokrasi kita, sehingga sulit untuk sepakat bahwa demokrasi masih belum terkonsolidasi,

<sup>9</sup> Sebagaimana juga penilaian Panji Anugerah, dosen Ilmu Politik UI, yang tengah menyelesaikan program doktoral ilmu politiknya di Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg, Jerman.

<sup>10</sup> Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Equinox Publishing, 2006, *op.cit.*

<sup>11</sup> Daniel S. Lev, "Political Parties in Indonesia," *Party System of Southeast Asia, Journal of Southeast Asian History*. Singapore: March 1967.

<sup>12</sup> Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Society*. Yale: Yale University Press, 1968.

<sup>13</sup> Arend Lijphart, *Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*. New Haven: Yale University Press, 1984.

<sup>14</sup> Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Society*. New Haven: Yale University Press, 1968, *op.cit.*

<sup>15</sup> Richard Robison, *The Rise of Capital*, Sydney, Allen & Unwin, 1986.

<sup>16</sup> Andrew Macintyre, *Business and Politics in Indonesia*, Syufney: Allen & Unwin, 1991.

<sup>17</sup> Yoshihara Kunio, *The Rise of Ersatz Capitalism in Southeast Asia*, Manila: Ateneo de Manila University, 1988.

<sup>18</sup> Lihat, Jeffrey A. Winters. *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

<sup>19</sup> M. Dawam Rahardjo, "Pancasila dan Akhir Ideologi," *Kompas*, 22 Juni 2013.

<sup>20</sup> M. Dawam Rahardjo, *Esei-esei Ekonomi-Politik*: Jakarta, LP3ES, 1985.

<sup>21</sup> Komentar Bivitri Susanti, peneliti senior dari Pusat Studi dan Kebijakan Hukum (PSHK), Jakarta, yang sedang menyelesaikan studi doktoralnya dalam bidang hukum di University of Washington, Seattle, AS.

seperti ada dalam perspektif Juan J. Linz dan Alfred Stepan,<sup>22</sup> seorang analis perubahan rejim dan demokratisasi. Tulisan ini selanjutnya mengungkapkan mengapa koreksi terhadap demokratisasi di Indonesia cenderung bersifat parsial, dan tidak memberikan solusi (alternatif) yang efektif, sehingga perwujudan konsolidasi demokratis masih jauh dari yang diharapkan. Sementara, sukses konsolidasi demokratis membutuhkan kehadiran partai politik yang kuat dan telah menjalankan kesemua fungsinya secara efektif sebagai wahana pendidikan politik, kaderisasi sosialisasi politik, serta artikulator aspirasi dan kepentingan rakyat, serta sebagai sarana implementasi demokrasi pasca-pergantian rejim dan transisi demokratis secara damai. Di samping itu, secara simultan, konsolidasi demokratis harus dapat menciptakan sebuah sistem baru yang mampu menjamin tegaknya *rule of law* dan menciptakan pers dan masyarakat sipil yang masing-masing dalam kondisi independen dan kokoh sebagai kekuatan-kekuatan politik alternatif demokrasi, di luar partai politik.<sup>23</sup>

Kegagalan pendekatan institusionalisme selama ini dalam beberapa kali periode pergantian rejim dan membawa proses transisi menuju konsolidasi demokratis di Indonesia, serta keterbatasannya dalam menjelaskan kegagalan konsolidasi demokratis di Indonesia menjadi fokus bahasan esei ini. Pentingnya kembali mencari solusi alternatif dengan menggunakan pendekatan ekonomi-politik atas berbagai permasalahan politik di Indonesia, yang mulai diabaikan, menjadi pokok bahasan dalam esei ini di tahap berikutnya, Tinjauannya akan menyentuh banyak persoalan lainnya yang dihadapi negara ini dewasa ini, yang tampak kian kompleks dan memburuk implikasinya di berbagai bidang, sehingga negara ini dinilai tengah menuju wilayah abu-abu di ujung proses transisi demokratisnya --sebuah tahapan atau proses selanjutnya menuju negara gagal, seperti

yang banyak dikuatirkan analis perubahan politik.<sup>24</sup> Dalam terminologi yang lebih terkini adalah negara rentan, dengan parameter angka indeks yang tinggi, di antaranya memiliki indikator yang buruk, dengan kondisi elit yang terbelah, korupsi yang sistemik, kemiskinan dan penurunan ekonomi, pembangunan tidak merata, pelayanan publik yang buruk, dan seterusnya.<sup>25</sup> Dalam hal ini, bukan perbedaan geografis dan budaya yang membuat ada negara yang makmur, dan yang lainnya miskin dan tidak stabil, dengan berbagai konflik sosial silih berganti.<sup>26</sup>

## B. Institusionalisme dan Alternatifnya

Pendekatan institusionalisme, yang sering diidentifikasi sebagai pendekatan legal, merupakan salah satu pendekatan yang dominan dalam ilmu sosial, termasuk ilmu politik, sejak disiplin ini mulai berkembang pada awal abad 19 sampai tahun 1980an, ketika pendekatan lain belum populer dan dominan dipakai. Adapun pada masa ini, kekuasaan formal, struktur organisasi, dan aturan hukum serta hal-hal normatif merupakan titik-tolak pembicaraan.<sup>27</sup> Dalam perspektif ini, masalah-masalah dalam negara dan masyarakat dalam disiplin ilmu politik, ekonomi, dan juga ilmu hukum, selalu dilihat dari analisis terhadap institusi yang berjalan, dengan tawaran solusi perbaikan atas kerusakan sistem yang ada dan tidak berjalan dalam institusi. Pendekatan ini bertitik-tolak dari asumsi, bahwa jika masalah dalam institusi dapat diidentifikasi dan ditemukan, untuk kemudian dapat dikoreksi, maka masalah akan teratasi dengan sendirinya, karena sistem telah dapat berjalan kembali atau menjadi lebih baik beroperasi.

Sebagai konsekuensinya, masalah-masalah masyarakat dan kenegaraan yang dihadapi

<sup>22</sup> Juan J. Linz and Alfred Stepan, *Problemes of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Washington DC: John Hopkins University Press, 1996.

<sup>23</sup> *Ibid*: 6-7.

<sup>24</sup> Lihat, Wolfgang Merkel *et al*, *Defekte Demokratie*, Band I: Theorie: Opladen: Leske & Budrich, 2003:113-116.

<sup>25</sup> Antony Lee, "Indeks Negara Rentan: Parpol, Korupsi, dan Penguasaan Elite," *Kompas*, 5 Maret 2016: 4.

<sup>26</sup> Lihat, Daren Acemoglu and James Robinson. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Paperback, Crown Business, 2013

<sup>27</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008: 72.

Indonesia sejak ia berdiri sampai periode pasca-reformasi (1998) selalu dilihat dalam perspektif institusionalismenya. Begitupula, dengan tawaran perbaikannya dalam perjalanan perkembangan masyarakat dan negara selama 70 tahun ini. Tidaklah mengherankan, solusinya menjadi tamal-sulam, tidak memecahkan masalah, dan malah membuat arah perkembangan politik menjadi semakin buruk atau tidak menentu. Sebab, pendekatan dan solusi masalahnya tidak menyentuh dan mampu merespons penyebab karut-marut permasalahan negara dan masyarakat di Indonesia, yang berkembang sejak jaman kolonialisme. Sementara itu, analisis sejarah masyarakat dan ekonomi-politik menjadi terabaikan.

Selanjutnya, teori ilmu sosial yang sederhana dan terbatas, seperti teori sistem David Easton dan pendekatan perilaku kaum behavioralist, termasuk pilihan rasional, menjadi primadona sampai periode transisi demokratis di Indonesia di akhir tahun 1960-an dan di awal tahun 1980-an. Masalah muncul ketika gelombang demokratisasi ketiga menghadapi masalah, atau berkembang tidak mengikuti arah yang dialami negara-negara di Eropa Selatan atau Eropa Barat sebelumnya. Sehingga, pendekatan alternatif yang lebih empirik atau bumi, dan diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih memuaskan, seperti teori dependensia dan keterbelakangan Andre Gunder Frank, Cardozo, Furtado dan lain-lain,<sup>28</sup> serta teori sistem dunia Immanuel Wallerstein,<sup>29</sup> mulai dilirik. Berbagai teori alternatif ini menjadi lebih dibutuhkan, padahal pisau analisis ekonomi-politik yang menjadi basis berpikir untuk pengembangan teori mereka sudah hadir dan diintroduksi jauh sebelumnya, apalagi yang berkembang dari perspektif yang Marxis.

<sup>28</sup> Andre Gunder Frank, *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. New York: Monthly Review Press, 1967; Juga, Henry Berstein (Ed.), *Underdevelopment and Development, the Third World Today*. Penguin Books, 1976.

<sup>29</sup> Immanuel Wallerstein, *Modern World System*. New York: Academic Press, 1976; Immanuel Wallerstein, *World System Analysis*, Durham, Duke University Press, 2004.

Ahli politik dan perubahan sosial asal Amerika, Samuel P. Huntington,<sup>30</sup> yang dekat dengan para pengambil keputusan di Gedung Putih, merupakan salah satu pakar yang telah mengidentifikasi relasi perlunya pembangunan politik sebagai tindak lanjut dari sukses pembangunan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan tingginya yang stabil. Ia, bahkan, telah memberikan peringatan dini bahaya yang muncul akibat situasi pertumbuhan ekonomi tinggi yang tidak diiringi oleh tersedianya ruang yang cukup untuk partisipasi politik publik, yang membedakannya dari mobilisasi politik yang dirancang oleh rejim-rejim otoriter. Tanpa dibukanya ruang partisipasi publik ini, instabilitas politik akan muncul, yang tidak hanya merusak kesuksesan pembangunan ekonomi, tetapi juga pada akhirnya mengancam kelangsungan rejim yang memerintah.

Dalam analisis yang lebih kontemporer, kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, atau demokrasi secara lebih spesifik, telah dilihat oleh Amartya Sen,<sup>31</sup> ilmuwan ekonomi-politik India. Ia berargumen, membalik tesis, bahwa ruang politik untuk berdemokrasi harus diberikan. Tanpa itu, dengan absennya demokrasi, pertumbuhan ekonomi hanya akan memusat pada segelintir orang, dan kesejahteraan rakyat tidak dapat diwujudkan. Untuk itu, negara harus turun tangan, berperan dalam melakukan distribusi pertumbuhan dan kesejahteraan. Argumen ini menjadi dasar bagi kaum intervensionis dalam disiplin ekonomi untuk membenarkan campur tangan negara, yang sebaliknya, sangat ditentang kaum ekonom liberal yang sangat pro-pasar dan anti-intervensi.

Tesis Huntington tampaknya relevan untuk Indonesia dan negara berkembang lainnya, namun mampu terus ditolak China, yang tidak melihat pentingnya reformasi politik, asalkan kebijakan distribusi pertumbuhan dan kesejahteraan dapat dilakukan. Dengan

<sup>30</sup> Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Society*. Yale: Yale University Press, 1968, *op.cit.*

<sup>31</sup> Amartya Sen, *The Idea of Justice*. UK: Allen Lane, 2009; Amartya Sen, *Poverty and Famine*. Oxford, UK: Oxford University Press, 1981.

model strategi pembangunannya ini, model pembangunan China dipertanyakan, apakah masih relevan disebut sebagai model pembangunan sosialis? Demikian pula, ia dinilai menjadi tidak tepat untuk disebut kembali sebagai China komunis, mengingat kepemilikan kolektif (kolektifisme) tidak lagi mutlak diterapkan di bawah kontrol negara, partai (Partai Komunis China --PKC), dan tentara (Tentara Pembebasan Rakyat --TPR).

Terlepas dari penilaian baru itu, yang jelas, Pemerintah China (Republik Rakyat China --RRC) pasca-Deng Xiaoping, yang telah sukses dengan introduksi pertumbuhan ekonomi dan eksperimen pembangunan baru kapitalisnya secara lebih luas, tidak mau menerima tekanan Barat untuk melakukan reformasi politik atau demokratisasi. Situasi yang berkembang ke wilayah abu-abu pasca-transisi demokratis di negara demokrasi baru telah memperkuat alasan Pemerintah China untuk mempertahankan rejim politik otoriter mereka, yang ditandai absennya partisipasi politik rakyat, termasuk penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang terbuka dan jujur. China mempunyai alasan tersendiri untuk belajar dari kesulitan Rusia dalam menciptakan stabilitas politik pasca-*Glasnost* dan *Perestroika*. Sebab, secara realistis, Pemerintah China pasca-Deng --Deng yang dianggap Mao sebagai penganut jalan kapitalis-- tetap mampu mempraktekkan, tepatnya mengawinkan, sistem ekonomi yang kapitalis dengan sistem politik *a la* partai komunis, yang tertutup dan otoriter. Jalan demokrasi belum diputuskan, sehingga pintu demokrasi belum dibuka, seperti yang kemudian ditiru Viet Nam dan Kuba.

Dalam perspektif yang Marxis, analisis ekonomi politik terhadap masalah kemasyarakatan dan kenegaraan bertitik-tolak dan tidak lepas dari diskusi mengenai *mode of production* (cara produksi), *process of production* (proses produksi), dan juga *means of production* (alat produksi), di luar diskursus filsafat, sebagian bagian yang sama pentingnya. Sebagai konsekuensinya, pola cara produksi atau model cara produksi mendominasi analisis ini. Dalam lingkungan

yang menggunakan perspektif ini dibahas secara panjang lebar cara produksi di masyarakat atau sebuah negara, terutama konstelasi pihak yang berkuasa (mempunyai kekuasaan politik) dan yang menguasainya, terutama yang dominan. Struktur dan kondisi alat produksi serta kontrol terhadapnya menjadi hal lain yang sama pentingnya untuk diperhatikan.

Dalam konteks ini, dapat dijelaskan, mengapa dalam banyak riset dan kajiannya tentang kondisi dan perkembangan kekuatan ekonomi rakyat, M. Dawam Rahardjo, banyak mengangkat kasus dan belajar dari cara produksi dan penguasaan, serta relasi cara produksi di negara seperti China. Lebih spesifik lagi, di masa lalu, ia mengajak kita untuk mengupas dan belajar dari model pembangunan sosialis *a la* Mao Zedong, yang sangat berakar atau berorientasi ke bawah.<sup>32</sup> Sebelumnya, Paul A. Baran,<sup>33</sup> dalam karyanya mengenai model-model ekonomi politik berbagai negara telah mempopulerkan pendekatan ekonomi politik, dengan telaah kasus yang jauh lebih beragam, dengan variant lebih banyak model pembangunan sosialis, seperti Kuba, Yugoslavia, dan, bahkan, di luar itu.<sup>34</sup> Walaupun terdapat kajian tentang pertumbuhan ekonomi dan keterbelakangan dalam kasus di berbagai negara, tetapi ia luput mendiskusikan model pembangunan sosialis dengan demokrasi dipimpin *a la* Indonesia (Soekarno dengan Orde Lama-nya).

Sementara itu, mereka yang juga dulunya melihat tetap relevan dan pentingnya perspektif institusionalisme, mencoba mengembangkan pendekatannya dengan melihat atau mengintroduksi varian analisis baru. Norma dan nilai kultural yang menjadi landasan perhatian kaum behavioralis dimanfaatkan untuk bisa memberi penjelasan secara lebih baik mengapa institusi-institusi modern belum efektif berfungsi di negara-negara yang baru muncul. Hubungan dan interaksi aktor, dengan berbagai

<sup>32</sup> M. Dawam Rahardjo, *Esei-esei Ekonomi-Politik*. Jakarta, LP3ES, 1985, *op.cit.*

<sup>33</sup> Paul A. Baran, *The Political Economy of Growth*. Monthly Review Press; Penguin Books, 1972.

<sup>34</sup> Lihat pula, Paul A. Baran, *The Political Economy of Development*, Penguin Books, 1974.

latar belakangnya, selanjutnya ditelaah untuk melihat implikasinya terhadap respons institusi. Juergen Rueland adalah salah satu *Indonesianist* (asal) Jerman (*Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg*) yang termasuk ahli dalam melihat cara bekerja pisau analisis institusionalisme dalam kombinasinya dengan pendekatan konstruktifis atau yang lebih maju, neo-konstruktifis. Tidaklah mengherankan kemudian, dikenal kehadiran terminologi neo-institusionalisme dalam studi-studi ilmu sosial yang muncul belakangan.

### C. Kapital dan Kartel

Absennya, atau jika tidak setuju, belum dominannya, pisau ekonomi-politik yang mengupas dan menganalisis secara mendalam peran kapital sejak dasawarsa 1980, menjadi penyebab dari analisis yang tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai terhadap masalah (perkembangan) politik dan kekuasaan, terutama perwakilan politik, di Indonesia. Sebenarnya, dengan melihat kembali ke belakang, ke pertengahan 1980-an, kalangan akademik di Indonesia sudah diperkenalkan dengan pisau analisis ini, setelah terbitnya karya Richard Robison, *Indonesianist* dari Universitas Murdoch, Australia, *the Rise of Capital*.<sup>35</sup> Ketika itu, karya Robison masih terdiseminasi secara terbatas, karena politik otoriter rejim Orde Baru yang antikritik dan tersudutkan oleh analisis yang masih langka tentang relasi perkembangan kapitalisme sejak masa kolonial hingga Soeharto dan kaitannya dengan konstelasi politik dan kekuasaan yang kemudian berkembang di Indonesia.

Masih hangat dalam ingatan penulis, lebih dari 3 dasawarsa lalu, untuk mendapatkan analisis Robison itu sulit sekali. Kehadiran bukunya beresiko tinggi, membacanya pun harus sembunyi-sembunyi, karena mengungkap dan mengkritisi sepak terjang elit penguasa Orde Baru yang tengah membangun kemapanannya dengan menciptakan koalisi dengan para konglomerat dalam mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Sehingga, banyak

<sup>35</sup> Richard Robison, *The Rise of Capital*. Sydney, Allen & Unwinn, 1986, *op.cit.*

pihak, terutama Soeharto dan keluarganya yang telah muncul sebagai kekuatan ekonomi baru yang menggurita, sebagai kompetitor dari para konglomerat atau pemilik modal lainnya pada waktu itu, menjadi tidak nyaman.

Pada lebih tiga dasawarsa lalu, mata kuliah "Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia," yang disampaikan Arbi Sanit di kampus Rawamangun, yang sarat dengan telaah kritis, yang sensitif bagi rejim, termasuk rejim kampus, namun menarik bagi para mahasiswa, belum memasukkan kapital atau modal sebagai salah satu unsur *power* yang juga menentukan munculnya kekuatan politik baru di Indonesia. Karya Robison masih baru dikenal pada masa itu, sehingga analisis terhadap tokoh atau kelompok tertentu sebagai sebuah kekuatan politik, belum terfokus pada kekuatan dan pengaruh modal miliknya atau pengusaha lain yang mendukung secara finansial segala aktifitas politiknya. Terlebih lagi di Fakultas Ilmu Sosial (FIS, belum menjadi FISIP) UI di pertengahan dasawarsa 1980, sudah hadir Dr. Farkhan Bulkin yang baru selesai studi ekonomi-politik internasional dari (*George Washington University*) AS. Ia berkontribusi dalam analisis negara dan masyarakat, dengan melihat kondisi kapitalisme pinggiran dan peran kelas menengah Indonesia. Sayangnya, mata kuliah ekonomi politik (internasional) masih memberikan daya tarik yang terbatas buat kampus UI, khususnya jurusan ilmu politik (FIS) dan sejarah (Fakultas Sastra).

Kehadiran karya Robison seharusnya telah dapat mempertajam pisau analisis ekonomi-politik di dasawarsa 1980, karena setahun sebelumnya sudah hadir *Esei-esai Ekonomi Politik*-nya M. Dawam Rahardjo.<sup>36</sup> Apalagi, jika melihat dalam perkembangannya sesudah itu, analisis dunia akademis telah diperkaya oleh kehadiran karya Andrew MacIntyre,<sup>37</sup> *Indonesianis* Australia, dan juga Yoshihara Kunio,<sup>38</sup> *Indonesianis*

<sup>36</sup> M. Dawam Rahardjo, *Esei-esai Ekonomi-Politik*. Jakarta, LP3ES, 1985, *op.cit.*

<sup>37</sup> Andrew Macintyre, *Business and Politics in Indonesia*, Syufney: Allen & Unwinn, 1991, *op.cit.*

<sup>38</sup> Yoshihara Kunio, *The Rise of Ersatz Capitalism in South-east Asia*, Manila: Ateneo de Manila University, 1988, *op.cit.*

Jepang, dengan analisis kapitalis semu (*ersatz capitalism*)-nya Indonesia. Tidak mengejutkan, keduanya melihat anomali dalam kemunculan dan pertumbuhan kapitalisme di Indonesia, yang membedakannya dengan sejarah perkembangan kapitalisme di Barat. Sebab, dalam studi lebih awal, di jurusan ilmu ekonomi dan studi pembangunan FE-UI, dan juga ilmu sosial FIS-UI, mahasiswa telah diperkenalkan dengan kesimpulan Boeke, ekonom Belanda, mengenai dualisme ekonomi yang hidup berdampingan di Indonesia, yakni sektor modern dan tradisional, sejak era kolonial.

Sayangnya, analisis ekonomi-politik tentang peran kapital ini tampaknya tidak memperoleh perhatian serius dalam dunia akademis, terutama disiplin politik dan politik perbandingan (*comparative politics*), yang tidak menggunakannya lebih dalam untuk pisau analisis dalam memahami perkembangan politik di tanah air pada tahap selanjutnya. Sebaliknya, Indonesianis lain, asal AS, seperti Jeffrey A. Winters,<sup>39</sup> melanjutkan penggunaan pisau analisis ekonomi-politik ini dalam memahami politik Indonesia di akhir pemerintahan Soeharto sampai tahun-tahun awal era reformasi, atau periode transisi demokratis dari rejim otoriter, dengan peran militer yang kuat ke pemerintahan sipil yang terbuka. Dengan pisau analisisnya ini, seperti halnya Hadiz (2005),<sup>40</sup> ia menemukan anomali kembali dalam politik Indonesia di tahun-tahun awal era reformasi dalam wujud oligarki politik lama yang menguat akibat sistem kapitalisme dan neoliberalisme yang tumbuh subur di era baru kebebasan politik yang luas. Perbedaannya terletak pada aktornya yang sedikit melebar (beragam), yang bukan berarti merata, sebagai bukti tersebarnya kesejahteraan rakyat secara relatif lebih baik, dan pola feodalismenya yang berkembang ke arah neofeodalisme.

<sup>39</sup> Jeffrey A. Winters, *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, *op.cit.*

<sup>40</sup> Vedy R. Hadiz, *Dinamika kekuasaan: ekonomi politik Indonesia pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 2005; Vedy R. Hadiz, The Rise of Capital and the Necessity of Political Economy, *Journal of Contemporary Asia*, 05/2013, 43(2); Vedy R. Hadiz, The Rise of Capital and the Necessity of Political Economy, *Indonesia*, 01/2013. Lihat juga, Ian Chalmers and Vedy R. Hadiz (Eds.), *The Politics of Economic Development in Indonesia: Contending Perspectives*. Routledge: London, 2005.

Andreas Ufen kemudian mendeskripsikannya sebagai gejala “Filipinaisasi” perkembangan politik Indonesia dalam pasca-Soeharto.<sup>41</sup>

Sementara itu, Kuskridho Ambardi (2009)<sup>42</sup> melengkapi dan memperkaya analisis ekonomi-politik ini dengan tesis kartel politik yang muncul dalam politik Indonesia, dalam koalisi pasca-pemilu, khususnya dalam formasi kabinet. Kartel politik ini menjadi sedikit berbeda dari Jerman,<sup>43</sup> mengingat di Jerman adalah legal dengan dukungan subsidi partai politik dari negara, sesuai dengan peroleh suara dalam pemilu atau kursi untuk parlemen, sekalipun tujuannya bisa serupa, yakni untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan politik. Namun, koalisi besar (*grand coalition*) antara 2 partai politik utama di Jerman, yakni *Christlich Demokratische Union* (CDU) dan *Sozialdemokratische Partei Deutschlands* (SPD), tidak akan bersifat permanen. Di Jerman, tanah kelahiran Marx, dan juga tempat lahir dan tumbuh dan berkuasanya fasisme Partai *National Sozialistische* (Nazi), ideologi sulit dikatakan telah benar-benar mati, seperti diidentifikasi Daniel Bell,<sup>44</sup> dan sejarah telah benar-benar berakhir, seperti dikatakan Fukuyama.<sup>45</sup> Karena, perjuangan partai komunis eks-Jerman Timur, yaitu *Partei des Demokratischen Sozialismus* (PDS), dan partai politik titisan Nazi, yaitu *Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei* (NSDAP) masih eksis, walaupun tidak sedahsyat sebelum Perang Dunia II dan periode Perang Dingin, dan sekalipun ekonomi

<sup>41</sup> Pernah diangkat dalam diskusi sebuah artikel di *Kompas*. Lihat pula, Andreas Ufen. “Party systems, Critical Junctures, and Cleavages in Southeast Asia.” *Asian Survey*, Volume, 01, 2012, 52, No.3: 441-464. Juga, Andreas Ufen, “From *aliran* to dealignment: political parties in post-Suharto Indonesia.” *South East Asia Research*, 16, 2008, No.1: 5-41.

<sup>42</sup> Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Penerbit KPG, 2009.

<sup>43</sup> Penulis tidak sependapat dengan Yuna Farhan, ahli analisis anggaran (*budget analyst*) dari Fitra, yang tengah menyusun tesis dan melakukan riset mengenai relevansi menguatnya oligarki dengan *budget struggle* antar-fraksi di parlemen, di University of Sydney, Australia, yang menurutnya, akan mengarahkan praktek seperti ini di Indonesia menciptakan kartel politik seperti di Jerman (*sic!*).

<sup>44</sup> Daniel Bell, *The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties*, Harvard University Press, 1960.

<sup>45</sup> Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, New York: Free Press, 1992.

pasar sosial (*Soziale Marktwirtschaft*) telah, dan akan terus, bekerja keras membatasi kesenjangan sosial yang diciptakan kapitalisme Jerman, untuk mewujudkan dan mempertahankan visi negara kesejahteraan.

Bedanya juga, koalisi politik di Indonesia terbentuk pasca-pemilu, yang artinya merupakan bentuk manipulasi terhadap mandat politik dan kepercayaan rakyat pada partai-partai politik yang telah mereka dukung atau pilih dalam pemilu. Di sini, ideologi partai politik semakin terbukti tidak bekerja, mandul, atau benar-benar telah mati. Partai politik menjadi benar-benar pragmatis: mengejar pemenuhan kepentingan kekuasaan dan finansial secara simultan. Sementara itu, kehadiran karya Dan Slater, Indonesianis kontemporer lain dalam studi politik Indonesia, kemudian memperdalam pisau analisis ekonomi-politik yang ada, dengan karena dapat dipakai untuk menilai implikasi kehadiran kartel politik terhadap prospek pemerintahan berikutnya, Jokowi.

#### D. Transformasi Kapital

Apa relevansi pendekatan ekonomi politik ini dengan perkembangan demokrasi kita yang belum dapat dikatakan sudah terkonsolidasi?<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Kalangan yang memiliki pandangan yang berbeda dengan penilaian ini, antara lain, Ikrar Nusa Bhakti dari LIPI, dalam diskusi di sebuah jaringan televisi di awal tahun 2015 ini mengatakan demokrasi Indonesia sudah terkonsolidasikan. Ini alasannya, semua perbedaan berusaha diselesaikan melalui cara-cara politik di parlemen (DPR), tidak ada yang terpancing atau berminat untuk merencanakan atau melakukan perebutan kekuasaan dengan cara kekerasan atau melalui kudeta terbuka, seperti di masa sebelumnya. Pandangan ini menjadi naif, jika penggunaan terminologi “konsolidasi demokratis” bertitik-tolak dari karya-karya para analis transisi politik di *new emerging democracies*, seperti Juan J. Linz dan Alfred Stepan 1996, *op.cit.*, yang berpatokan bahwa konsolidasi demokratis telah tercipta, jika partai politik, kekuatan masyarakat sipil, media massa telah berkembang dengan baik, mapan, dan independen dalam memainkan peran mereka yang konstruktif pasca-transisi atau pergantian rejim. Selain itu, tolak ukur bahwa konsolidasi demokratis telah tercipta adalah jika *rule of law* telah tegak di negara baru itu, dengan kondisi, hukum selalu menjadi pegangan untuk setiap penyelesaian konflik politik yang muncul pasca-transisi. Sehingga, pemahaman tentang “*democracy is the only game in town*” harus dipahami dalam konteks yang lebih dalam, tidak di permukaan, tetapi secara sistemik dan kultural.

Pertama-tama yang ingin dikatakan adalah telah berlangsungnya kekeliruan arah perkembangan demokrasi kita, yang menggagalkan terwujudnya konsolidasi demokratis. Partai-partai politik tidak mampu memainkan keseluruhan peran dan fungsinya dalam melakukan rekrutmen politik yang baik, serta menyiapkan para kader untuk memiliki kapabilitas yang tinggi dalam mengelola pemerintahan dan parlemen.

Kemudian, lebih jelas lagi, partai-partai politik telah berkembang menjadi korporasi-korporasi politik keluarga dan semakin mendukung munculnya oligarki, dan bahkan, memperkuat strukturnya. Dari dalam partai politik sendiri, misalnya Partai Golkar, yang mendominasi pemilu sejak 1971 hingga 1997, muncul kritik dari tokohnya, yakni Akbar Tanjung. Ia menyadari munculnya saudagar,<sup>47</sup> yang artinya juga pengusaha atau pemilik modal, ke dalam tampuk pimpinan, turut membawa konsekuensi negatif, selain bisa lebih membantu partai politik dalam mengatasi masalah finansial secara langsung, ketimbang harus menunggu bantuan subsidi terbatas dari negara yang ditunggu-tunggu, tetapi tidak pernah datang. Adapun konsekuensi negatifnya yang disadari adalah tersingkirnya tokoh dan aktifis partai politik yang berdedikasi dan memiliki kapabilitas tinggi oleh mereka yang memiliki kekuatan modal. Penilaian ini tentu berlaku universal, tanpa pengecualian, terkena untuk siapa saja pemilik modal, saudagar, atau pengusaha yang menjadi pemimpin dan/atau sekaligus pemodal partai politik yang sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan, membuat kebijakan, dan menentukan perjalanan dan masa depan partai tersebut.

Akibat berkuasanya pengusaha atau pemilik modal di dalam partai politik, modal sosial yang dimiliki para kader yang cakap tersingkir begitu saja oleh modal uang kader yang bisa saja baru muncul dan merupakan tokoh atau aktifis di partai lain. Sehingga, kepemimpinan model ini dinilai tidak akan bertahan lama, karena

<sup>47</sup> Akbar Tanjung, “Partai Golkar dalam Pergolakan Politik Era Reformasi: Tantangan dan Respons”, disertasi doctoral, Yogyakarta: Pasca Sarjana fisipol UGM, 2009.

semata dikelola untuk kepentingan pragmatis, menampung para “kader lompat pagar,” serta mengabaikan pengembangan institusi partai<sup>48</sup> dan peran partai dalam melakukan kaderisasi, sosialisasi serta fungsi komunikasi dan pendidikan politik. Partai politik tidak lagi menganggap penting proses politik dalam pengambilan keputusan, dan berorientasi pada sasaran dan hasil jangka pendek, sehingga usia kepemimpinannya pendek pula. Namun, secara realistis, kepemimpinan Aburizal Bakrie bisa berlanjut pasca-kekalahan Golkar dalam pemilu 2014, terlepas dari adanya tuduhan rekayasa politik, serta munculnya kemudian kontroversi dan friksi, yang berlanjut dengan konflik partai yang berkepanjangan. Sebab, dengan dukungan kemampuan modal ekonomi dan finansialnya dalam partai politik Golkar, Aburizal Bakrie mampu mempertahankan dan mengoreksi kepentingan politiknya, dan sekaligus, bukan kebetulan, prospek imperium bisnisnya.

Dalam konteks perkembangan ini, Puskapol UI sesungguhnya telah melihat persoalan ini, dengan menyitir Vedy R. Hadiz yang berpendapat bahwa kapitalisme dan neoliberalisme telah mengubah oligarki dari yang berjiwa feodal menjadi komersial.<sup>49</sup> Sebagai implikasinya, aktifitas politik dalam partai politik dan perhitungan politik yang diambil para elite pengambil keputusannya tidak lepas dari transaksi bisnis. Dengan kata lain, partai politik kemudian berkembang menjadi institusi untuk mempertahankan kepentingan pribadi secara kontiniu.<sup>50</sup>

Ini berarti, nominasi calon dalam pemilihan umum untuk legislatif dan pemerintahan nasional, serta legislatif dan pemerintahan daerah tidak lagi berbasiskan pertimbangan

*merit system* (prestasi, kinerja, integritas, dan loyalitas) yang murni. Karena itu, relasi di dalam partai politik sangat diwarnai hubungan nepotisme dan kolusi yang kuat, sedangkan hubungan kedekatan secara ideologi kian sirna. Perkembangan ini turut membawa implikasi penempatan para kader partai politik tidak lagi berbasis keahlian. Dengan perspektif ini, dapat dijelaskan mengapa penempatan mereka di (AKD), terutama Komisi-komisi di parlemen (DPR) belakangan semakin memperlihatkan adanya kesenjangan dan ketidakpuasan, akibat aspirasi dan kapabilitas yang berbeda dengan realitas.

Begitu pula, posisi siapa yang bakal menjadi orang nomor satu di fraksi atau Ketua Fraksi, dan bahkan pimpinan masing-masing AKD dan DPR, menjadi kian sulit diperkirakan, kecuali untuk tokoh yang dipastikan memiliki kekuatan atau kontrol kapital yang besar, hubungan kedarahan, atau bisnis, dan bukan lagi emosional dan ideologis, atau karena loyalitas dan kesamaan visi dan cita-cita yang luas. Bahkan, sebelum dan sesudah pemilu dilangsungkan, para kader partai politik jauh lebih tertarik untuk melakukan langkah yang tidak profesional dan terhormat, dengan menggunakan kemampuan finansialnya, untuk memperebutkan dan memperoleh nomor kandidat yang terkecil atau teratas. Adalah telah menjadi sebuah rahasia umum dewasa ini, kandidat berusaha saling menjegal dengan rekan pencalonan separtainya, menggunakan langkah-langkah emosional tidak terpuji, termasuk melakukan praktek jual beli, atau pelimpahan, suara. Karakter oligarki yang semakin berkembang materialistis dan kapitalistis pada akhirnya dapat menjelaskan dengan baik mengapa pemilu menjadi mahal. Ini artinya, calon legislator (caleg) harus dapat menyediakan uang untuk pencalonan dan kampanye mulai dengan anggaran sebesar (tiga) ratusan juta sampai (delapan) miliaran Rupiah.

Kemampuan caleg, capres, atau calon kepala daerah menyediakan “uang perahu” telah membuat partai politik mengalami transformasi fungsi dari alat komunikasi, perjuangan aspirasi

<sup>48</sup> Lihat, Herman Siregar, “Bahtera Partai Golkar Terancam Karam,” 3 Mei 2009.

<sup>49</sup> Vedy R. Hadiz, *Dinamika kekuasaan: ekonomi politik Indonesia pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 2005, *op.cit*; Vedy R. Hadiz, “The Rise of Capital and the Necessity of Political Economy,” *Journal of Contemporary Asia*, 05/2013; 43(2), *loc.ci*; Vedy R. Hadiz, “The Rise of Capital and the Necessity of Political Economy.” *Indonesia*, 01/2013, *loc. cit*.

<sup>50</sup> “Reformasi Sistem Perwakilan Politik di Indonesia,” Puskapol FISIP-UI, 2015: 16.

dan sosialisasi, serta kaderisasi politik menjadi alat untuk menjalankan dan melindungi kepentingan bisnis serta melakukan praktek *brokerage* serta mengakumulasi kekayaan individu dan keluarga. Di masa Orba, partai politik telah menjadi alat yang sah, karena dilindungi UU, dan efektif untuk mobilitas sosial atau merubah nasib bagi individu-individu yang sulit memperoleh peluang mobilitas melalui jalur bisnis, karena kelangkaan modal atau kapital, dan, tentunya, kesempatan untuk maju dan meraih karir yang lebih baik. Parlemen, sebagai arena karirnya, lalu berkembang menjadi tempat dan tujuan untuk aktualisasi diri dan bukti tingkat prestasi politik atau pencapaian yang dapat diraih dalam kurun waktu yang berjalan.

Sebagai konsekuensinya, pemilu dan proses penentuan caleg hingga terpilihnya mereka di parlemen (DPR) menjadi sebuah paket politik yang mahal dan mewah. Ia telah berubah menjadi permainan yang semula melibatkan masyarakat di tingkat akar rumput dalam kegiatan kampanye menjadi menjauhkan diri dari kemampuan masyarakat kebanyakan untuk dapat berpartisipasi dan terlibat lagi dalam politik sesudah itu. Secara realistis, proses mobilitas politik ke atas dan kompetisi untuk meraih posisi kepemimpinan partai politik di tingkat bawah dan nasional kemudian selalu berhubungan dengan kemampuan tokoh dalam memegang dan mengontrol kapital sebagai alat dan sekaligus modal dan tujuan dalam berpolitik.

### E. Peran Dominan Kapital

Karena peran dominan kapital, kegiatan politik berkembang menjadi sangat elitis, kembali ke tangan satu-dua orang penentu saja di tingkat atas, terbatas di tangan atau di kalangan pihak yang mampu menyediakan modal (pemodal). Politik berkembang cepat sebagai kegiatan *rent seeking* dan akumulasi capital, mulai dari jumlah yang sedikit sampai *big projects*, mulai dari proyek yang ringan sampai yang berat. Sehingga, sampai urusan kelembagaan yang sepele pun sulit terlepas

dari upaya kontrol terhadap kapital. Partai politik menjadi sulit, terkendala, dan bahkan seringkali gagal untuk bisa menempatkan secara obyektif, berdasarkan kinerja dan prestasi, caleg dalam daftar pemilu. Serupa dengan keadaan itu, partai politik menemui hambatan untuk mampu mengalokasikan dan menempatkan secara *fair* pimpinan AKD di parlemen melalui kompetisi yang sehat dan seterusnya.

Yang lebih serius lagi, kegiatan studi banding parlemen tidak disiapkan dengan baik, cenderung asal jalan, untuk desakan kepentingan penyusunan UU dan fungsi legislasi secara luas. Praktek "pelebagaan ekonomi-politik" terus berlangsung di di DPR, sehingga membuat proses pembuatan kebijakan publik di parlemen menjadi pro-pasar.<sup>51</sup> Contoh jelasnya adalah dalam kasus penyusunan UU Minerba dan Kesehatan, dan RUU Tembakau. Anomali bertambah, dengan laporan observasi dan dokumen catatan mengenai rendahnya tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat-rapat paripurna, dan seterusnya. Di sisi lain, *power* dan *authority* meningkat drastis dengan imunitas anggota parlemen terhadap aplikasi sistem *at cost* dalam belanja akomodasi dan transportasi, terbebas sama sekali dari aturan dan mekanisme akuntabilitas yang berlaku dalam sistem belanja nasional. Sehingga, tidak aneh, aktifitas parlemen cenderung berkembang menjadi sangat materialistik dan komersial, yang awal dan akhirnya harus digerakkan oleh uang, karena kapital dibutuhkan kehadirannya untuk segala kegiatan. Sebaliknya, kegiatan yang sulit, apalagi seret, pembiayaan dan kering target uangnya, menjadi sangat sulit dijalankan, karena tidak mampu menarik motivasi yang luas dari politisi.

Pembicaraan tentang satuan tiga (1.3) dalam pelaksanaan fungsi anggaran (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara --APBN) memang sudah dilarang. Namun, kegiatan itu tetap dijustifikasi, sejauh untuk mendukung dan menjalankan fungsi pengawasan, dan bukan untuk menentukan proyek atau belanja barang.

<sup>51</sup> Makmur Keliat, "Pelebagaan Ekonomi-Politik," *Kompas*, 14 Maret 2016: 6.

Padahal, itu akan konstruktif jika dapat dilakukan DPR sebagai bagian dari *oversight function* terhadap kinerja pemerintah, dan bukan untuk (terlibat dalam) penentuan proyek di lapangan. Anggota parlemen memang harus memiliki kemampuan dalam mengamati perkembangan data ekonomi dan pasar secara realistis dan lebih detil untuk bisa mengontrol kinerja rejim yang berkuasa dari hari ke hari. Tetapi, perlu disadari dan dicermati, dalam sistem politik yang dikendalikan oleh upaya memperebutkan kewenangan atas kontrol kapital, larangan terhadap diskusi satuan tiga bisa bertransformasi dalam bentuk lain, yakni pembicaraan dalam lobi-lobi tertutup, yang justru lebih sulit diawasi publik, termasuk oleh LSM, masyarakat sipil, dan media massa.

Lobi-lobi dalam rapat tertutup yang formal, tanpa catatan rapat (notulen), terus dilegitimasi. Padahal, seharusnya, selain hanya boleh untuk mengatasi *deadlock* dalam rapat, lobi-lobi harus dilakukan secara terbuka dengan disertai risalah lengkap dan catatan rapat, sehingga tetap dapat dikontrol publik proses dan hasilnya. Jika tidak, rakyat hanya akan selalu menjadi sasaran komodifikasi politik para anggota parlemen, yang hanya dianggap penting menjelang dan saat pemilu saja.<sup>52</sup> Dengan demikian, DPR dan segala prosesnya, dan juga partai politik telah terpenjara oleh kekuatan modal dan kepentingan para pemilik modal yang dapat mengontrol perilaku anggotanya.<sup>53</sup>

Dalam karya Aspinall dan Mietzner, peran Fraksi di DPR dikatakan bersifat mutlak, tidak tersentuh.<sup>54</sup> Pendapat ini kurang tepat. Sebab, sebenarnya pimpinan fraksi tidak berarti apa-apa, jika ketua umum partai menegur, bahkan melalui telpon, atau memanggil mereka secara langsung ke markas partai politik, jika pernyataan atau keputusan mereka di DPR tidak disetujui ketua umum partai. Realitas ini terjadi di partai politik mana saja, yang

kedaulatan partainya terletak di tangan ketua partai, yang sekaligus pemilik modal, sebagai pemegang saham terbesar, yang menentukan kelangsungan partai politik sehari-hari.

Jadi, dapat dikatakan, politik di Indonesia sudah begitu elitis. Pertimbangan atas keputusan bisa begitu saja diabaikan oleh keputusan pemilik modal atau kedaulatan pemegang saham terbesar dalam partai politik. Jika si pemilik modal atau pemegang saham terbesar itu tidak langsung menduduki jabatan sebagai Ketua Umum partai, bisa saja, misalnya, sebagai Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Pertimbangan, seperti dalam kasus Hary Tanoesoedibjo dalam Partai Nasdem dan Hanura, keputusannya tetap berpengaruh besar dalam menentukan kebijakan.. Di partai politik lamanya, Nasdem, Hary Tanoe kalah berkompetisi, karena kalah dominan sahamnya dibandingkan Surya Paloh, sebagai pemegang saham utama dan pendiri partai itu. Untuk tujuan dapat lebih leluasa dalam menggolkan kepentingan individualnya, ia lalu mendirikan partai baru, Perindo, sekaligus Ketua Umum partainya.

Dapat dikatakan, tidak ada partai politik di Indonesia tanpa kehadiran pengusaha atau pemilik modal, apalagi dalam sebuah sistem dengan pembiayaan partai politik yang tidak didukung kuat iuran dan disiplin anggotanya, serta dengan ketidakpedulian dan absennya dukungan anggaran dari negara. Di PDIP, kehadiran pengusaha atau pemilik modal besar seperti tidak tampak. Tetapi, dalam sebuah sistem politik dengan akuntabilitas (keuangan) partai yang belum transparan, dapat diduga seperti yang berlangsung selama ini, banyak *invisible hands* dari para pengusaha atau pemilik modal besar yang mendukung keberlangsungan hidup partai politik, terutama untuk tujuan memenangkan pemilu. Jika tidak, partai sepopulis apapun, akan terpuruk nasibnya. Pengalaman ini baru dialami Partai Hanura, yang kurang serius didukung secara finansial oleh Hary Tanoesoedibyo, seperti yang telah dijanjikannya dalam kampanye pemilu legislatif dan pemilu presiden.

<sup>52</sup> Lihat, Asep Salahudin, "Komodifikasi Politik Wong Cilik," *Media Indonesia*, 22 Maret 2016: 6.

<sup>53</sup> Benny Susetyo, "Gagal Membaca Zaman." *Kompas*, 21 Maret 2016: 7.

<sup>54</sup> Lihat, Marcus Mietzner and Edward Aspinall (eds.). *Problems of Democratization in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2010.

Di PDIP, tentu juga terdapat penyandang dana operasional dari kalangan bisnis (pengusaha) dalam berbagai pelaksanaan pemilu. Sudah menjadi rahasia umum, para “samurai” telah berbagai peran, dengan sikap mereka yang pragmatis, untuk memenangkan tokoh partainya masing-masing, tanpa harus berkonflik terbuka. Sebab, siapapun yang nantinya menang pemilu, mereka siap berbagi “hidangan” proyek.<sup>55</sup> Sehingga, sejalan dengan sistem *patron-client* atau *clientalism* dalam struktur neo-feodalisme yang berjalan pasca-Soeharto, trah Soekarno sekalipun sulit dapat mempertahankan keunggulan partainya dalam pemilu legislatif tanpa dukungan pembiayaan pengusaha, selain Taufik Kiemas, salah satu tokoh PDIP juga merupakan pengusaha nasional. Dapat diasumsikan di sini, semakin banyak individu dari kalangan swasta berperan dalam kegiatan partai politik dengan kontribusi uang mereka, semakin besar pengaruh dan *reward* yang mereka bisa terima. Di masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), Partai Demokrat diketahui banyak didukung kehadiran pengusaha besar seperti Tomy Winata, Dato Tahir, dan lain-lain.

Sementara, Presiden Jokowi, sejak kampanye pemilu sampai dewasa ini didukung oleh pengusaha konglomerat kawakan sejak jaman Orde Baru, yaitu Sofyan Wanandi, ataupun pengusaha seperti Luhut B. Panjaitan, di samping Jokowi sendiri berlatarbelakang pengusaha, pemilik modal, dan aktor atau politikus yang memiliki kekuatan modal. Pengusaha itu telah menjadi bagian dari elit lingkaran dalam, yang aktif mengikuti sidang-sidang kabinet Jokowi, dan dalam menyusun kebijakan ekonomi pemerintah. Ini belum lagi menimbang peran para mantan perwira tinggi militer, seperti AM Hendropriyono, selain Luhut B. Panjaitan, yang juga telah masuk dalam jajaran pengusaha nasional baru, yang patut diperhitungkan perannya di pentas bisnis, dan sekaligus politik, nasional. Kemudian, juga ada Jusuf Kalla dan Yorris Raweyai, kelompok

saudagar dari timur Indonesia yang sebelumnya menjadi pendukung faksi Agung Laksono dalam Golkar. Kelompok ini berseberangan dengan faksi Aburizal Bakrie, yang bersama kekuatan ekonomi dan kelompok koalisinya --di sini termasuk pula MS Hidayat dan kelompok James Riady dan jaringan media massa Berita Satu-nya, yang dekat dengan Theo Sambuaga, Wakil Ketua Golkar faksinya-- mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah Jokowi-Kalla. Dapat dikatakan, hampir tidak ada partai politik dengan pucuk pimpinan atau pengurus teras yang bukan pengusaha atau terkait kelompok bisnis. Sebaliknya, akan sulit bagi anggota partai politik yang non-pengusaha atau pemilik modal, atau tidak memiliki hubungan dengan kelompok bisnis, untuk jadi pengurus di tingkat pusat (elit).

Di Gerindra, peran dominan Prabowo Subianto, Hasjim, dan keluarga Sumitro Djojohadikusumo tidak terbantahkan. Di Partai Demokrat, SBY turun gunung untuk memberi jalan bagi kembalinya peran dominan dinasti Sarwo Edhie. Dalam PAN, tokoh reformasi, Amien Rais, terus membangun dinasti politiknya, setelah Hatta tersingkir dan dikabarkan akan bergabung dengan dinasti SBY. Trah atau dinasti yang sedang membangun kekuasaan, seperti Megawati Sukarnoputri dan Hatta Rajasa, ketika muncul bisa saja tidak atau belum memiliki akses ke kapital secara langsung. Tetapi, struktur kapitalisme dan neoliberalisme yang mendukungnya, yang eksis dalam era pasca-1998, telah memberinya pula peluang untuk mengakumulasi modal menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Inilah semua wajah dari oligarki kekuasaan Indonesia dalam periode baru pasca-Soeharto, dengan kombinasi peran pengusaha (pelaku bisnis) dan militer, yang tidak jauh berbeda dengan pada masa Orba. Hanya kehadiran aktornya yang lebih beragam. Dengan demikian, apa yang telah diberikan Robison,<sup>56</sup> Macintyre,<sup>57</sup> hingga

<sup>55</sup> Wawancara dengan Satmono Hadi, alumnus FIS-UI, yang bekerja sejak lama di dunia perbankan, pada 14 April 2015, di Tangerang Selatan.

<sup>56</sup> Richard Robison, *The Rise of Capital*. Sydney, Allen & Unwinn, 1986, *op.cit.*

<sup>57</sup> Andrew Macintyre, *Business and Politics in Indonesia*, Syufney: Allen & Unwinn, 1991.

Winters,<sup>58</sup> dalam analisis ekonomi-politik mereka tidak jauh berbeda.

Sebagai implikasinya pula, pemilihan Ketua Fraksi menjadi praktek yang sangat elitis, tanpa perlu memperhitungkan pendapat orang-orang di lingkungan pengurus partai politik, apalagi konstituen. Padahal, kehadiran fraksi bukan tidak diperlukan, sebab seperti dalam praktek di parlemen Jerman (*Bundestag*), peran fraksi dapat membuat efektif cara kerja partai dalam memperjuangkan misinya, yang berakar pada aspirasi rakyat, di lembaga legislatif. Kelemahan dalam analisis peran fraksi ini terjadi karena kita telah mengenyampingkan peran modal yang dominan dan analisis ekonomi-politik dalam melihat perkembangan partai politik dan politik Indonesia secara utuh (komprehensif). Kelemahan analisis ini tampaknya mengulangi kelemahan analisis Stephen Sherlock dalam menilai fungsi representasi DPR, yang hanya dilihat dalam menerima konstituen dan menindaklanjuti pengaduan/petisi mereka, dan memisahkannya dari ketiga fungsi dasar parlemen yang inheren lainnya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.<sup>59</sup>

Sementara itu, kelemahan praktek sistem presidensial dengan (kehadiran) banyak partai bukannya tidak diketahui berbagai kelemahan oleh para ahli atau ilmuwan politik Indonesia. Sebab, kontroversi sistem presidensial dan banyak partai merupakan perdebatan lama (klasik), yang sudah muncul sejak Alexis de Tocqueville, ilmuwan politik Prancis, melakukan perjalanan ke AS, untuk belajar secara langsung perkembangan praktek demokrasi di sana.<sup>60</sup> Ketidakstabilan politik yang diakibatkan oleh penerapan sistem yang ketika itu sudah terlihat kelemahan atau ketidakcocokannya, juga telah dilihat sejak dini oleh Alexis de Tocqueville, yang kemudian memberi masukan berharga untuk

studi ilmu politik, baik di negara maju maupun berkembang. Karya tersebut lalu dijadikan semacam buku suci untuk demokrasi oleh para analis Barat. Demokrasi AS sendiri pada waktu itu baru tumbuh, sehingga seharusnya negara-negara demokrasi yang baru bermunculan dewasa ini sudah dapat lebih cerdas belajar dan mengambil manfaat dari pengalaman dan perjalanan demokrasi negara maju, tanpa perlu mengikuti, meniru, atau, bahkan, mengulangi kesalahan mereka.

Dalam studi ilmu politik terkini, kelemahan penerapan sistem presidensial dengan banyak partai itu memang tidak luput dari fokus perhatian ilmuwan Barat, seperti Juan J. Linz, Arturo Velenzuela, Matthew Soberg Shugart, dan Scott Mainwaring.<sup>61</sup> Sementara, ilmuwan politik (perbandingan) baru bermunculan di Indonesia, setelah mereka kembali dari studi, dengan program bea-siswa Barat, di AS, Australia dan lain-lain, misalnya Denny JA, Andi dan Rizal Malarangeng, Kuskridho Ambardi, Bima Arya, dan generasi terbaru seperti Jayadi Hanan, Philips Vermonte, dan sebagainya, yang kemudian mendirikan lembaga kajian (riset) dan survai mereka masing-masing. Sehingga, menjadi sangat tidak logis, jika para pakar politik Indonesia generasi baru tidak mengkritisi kesalahan yang sudah lama telah diperkirakan (bakal) terjadi ini di negara demokrasi baru, akibat sistem presidensial yang diaplikasikan dengan sistem banyak partai. Dalam beberapa tulisan, kritik sebenarnya sudah muncul,<sup>62</sup> namun pendekatannya tampaknya masih belum beranjak dari institusionalisme, tanpa mempertanyakan lebih jauh, dari perspektif yang berbeda, yakni ekonomi-politik. Pertanyaannya adalah, mengapa kesalahan ini sulit dihindari.

<sup>58</sup> Jeffrey A. Winters, *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

<sup>59</sup> Lihat, Stephen Sherlock, "The Indonesian Parliament after Two Elections: What Has Really Changed?" Canberra: CDI, 2007, *loc.cit.*

<sup>60</sup> Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, translated by Henry Reeve, 1840.

<sup>61</sup> Scott Mainwaring, *Presidentialism, Multipartyism, and Democracy: The Difficult Combination*, <http://cps.Sagepub.com>, *Comparative Political Studies*, 26, 1993; Juan Linz and Arturo (Eds), Velenzuela, *The Failure of Presidential Democracy*, Johns Hopkins University Press, 1994; Scott Mainwaring and Matthew Soberg Shugart, 1997, *Presidentialism and Democracy in Latin America*, Cambridge University Press, 1997.

<sup>62</sup> Lihat, misalnya, Sunny Tanuwidjaja, "Multipartai dan Presidensialisme," *Kompas.com*, 11 Juli 2008, diakses pada 23 Juni 2015.

Padahal, seharusnya, sudah muncul pemikiran alternatif dari para ilmuwan politik Indonesia generasi (milenium) baru untuk dapat melakukan terobosan, memperkenalkan inovasi, dan menawarkan solusi baru terhadap masalah yang dihadapi di negerinya terkait politik dan kekuasaan, khususnya perwakilan politik.

Merujuk pada pada pemikiran Juan J. Linz dan Alfred Stepan,<sup>63</sup> perlu digarisbawahi bahwa kegagalan konsolidasi demokratis di Indonesia adalah akibat dominasi peran kapital, yang dapat diukur pula dari perkembangan pers dan kebebasan media belakangan ini, yang tidak mengembirakan. Kontrol uang, selain melanda di partai politik, institusi pemerintah, yudikatif, dan parlemen, sehingga sering diplesetkan sebagai “trias-corruptica,” mencakup “execu-thieves,” “judica-thieves,” dan “legisla-thieves,” juga telah melanda pers/media massa. Kehadiran media bebas (liberal) semakin terbatas, karena kebutuhan pragmatis dan mendesak awak media untuk bisa *survive* di tengah-tengah kehadiran media massa yang semakin beragam dan berteknologi canggih, yang rivalitas mereka semakin sengit. Sementara, akibat gurita kapitalisme yang tidak terkontrol, media massa yang lemah modalnya akan lemah kinerjanya dan kalah berkompetisi, sehingga harus mengalihkan kepemilikan ke pemegang modal yang lebih kuat.

Dalam perkembangannya, kepemilikan media massa semakin mengerucut dan dikontrol beberapa pemodal besar saja, yang tidak lagi menyebar ke banyak pihak, namun terpusat pada pendiri dan pemilik partai politik. Ringkasnya, berita dan informasi media massa, cetak dan elektronik, berkembang menjadi partisan, atau cenderung memainkan peran dominan laksana corong partai, yang sangat *bias* pemberitaannya. Bisa disebut di sini misalnya, Surya Paloh mengontrol grup Metro TV dan Media Indonesia, Hary Tanoesoedibjo mengontrol grup MNC, RCTI, Global TV dan Sindo, Aburizal Bakrie mengontrol TV One dan Vivanews, Agung Laksono dengan AN TV, dan seterusnya. Sebagai implikasinya, media massa

tidak bisa lagi menjalankan peran sebagai pilar alternatif (keempat) demokrasi, di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif, seperti yang berjalan di AS, karena tidak ada lagi independensi dalam menyampaikan berita dan pandangannya.

Yang lebih memprihatinkan, kekuatan atau benteng lain sukses konsolidasi demokratis, yakni masyarakat sipil, tidak juga bebas dari pengaruh uang dan upaya kontrol terhadapnya. Sejarah muncul dan perkembangan masyarakat sipil Indonesia, yang berbeda dengan Barat, telah membedakan eksistensi dan kontribusi mereka terhadap demokrasi. Tidak heran, eksistensi mereka juga tergantung pada *funding* asing dan negara donor mereka, dengan berbagai *conditionalities* yang mereka sudah tentukan sejak awal. Sehingga, implementasi gagasan demokratisasi dan transparansi di Indonesia akrab dengan tekanan kebijakan dalam rangka penjualan aset negara ke institusi donor internasional, seperti IMF dan World Bank, MNC, atau TNC, untuk alasan liberalisasi dan penyehatan perekonomian nasional.

## F. Mensosialiskan Demokrasi

Di luar perkembangan kondisi pesimis di atas, sebenarnya, eksistensi sebagian besar kelas menengah masih bisa diharapkan, dengan sikap liberal mereka, sebagai satu-satunya yang kondisinya masih lebih baik dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya di Indonesia, untuk dapat mengarahkan proses transisi demokratis ke jalurnya kembali. Berbagai langkah koreksi harus segera dilakukan, sehingga Indonesia dapat mengarahkan jalannya menuju konsolidasi demokratis, dengan menawarkan solusi yang tepat. Langkah ini harus segera diambil setelah kita memiliki pemahaman yang tepat atas kondisi yang berkembang selama ini, dengan menggunakan analisis ekonomi politik yang kita bicarakan ini. Sebab, masalah ekonomi politik solusinya haruslah dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik pula.

Adapun solusi tepat yang ditawarkan itu, sebagai konsekuensinya, adalah memberi solusi dengan menggunakan cara berpikir dari dalam

<sup>63</sup> Juan J. Linz and Alfred Stepan, 1996, *op.cit.*

kapitalisme itu sendiri. Dengan jalan berpikir ini, sistem kepartaian yang elitis harus dieliminasi, dengan cara mendistribusikan saham kepemilikan secara luas ke masyarakat. Dengan demikian, dunia politik dan saham partai tidak dikuasai atau didominasi oleh sekelompok elit (oligarki) partai, melainkan secara perlahan dapat bermetamorphosis menjadi milik publik. Berbagai cara untuk membuat partai bisa dikontrol publik, dan secara lebih spesifik lagi, anggota parlemen bisa dikontrol konstituen mereka pasca-pemilu, bisa dilakukan. Langkah ini bisa dimulai dengan pemberian subsidi negara dalam jumlah tertentu, berdasarkan besaran atau parameter tertentu. Perhitungannya dapat dibuat berdasarkan perolehan kursi di DPR, untuk partai politik yang sukses dalam pemilu legislatif, mampu memenuhi ketentuan *parliamentary thresold*. Ambang batas parlemen dengan sendirinya menjadi seleksi awal boleh tidaknya partai-partai politik peserta pemilu menerima bantuan keuangan atau subsidi negara.

Gagasan tentang ini bukannya baru, sehingga tidak juga harus membuat Jahadi Hanan sebagai pihak yang pertama kali memperkenalkannya, seperti yang ia lontarkan dalam diskusi dengan Puskapol UI pada 27 April 2015. Gagasan ini sempat dibicarakan secara luas pasca-Pemilu-2009 untuk mencari solusi atas dashyatnya politik uang dalam pemilu, yang telah menjerumuskan banyak politisi dalam penjara, dan sebaliknya, menyebabkan gagalnya caleg yang cakap terpilih. Terakhir kali, Cahyo Kumolo, seorang pengurus teras PDIP, yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), secara resmi mengusulkan pemberian dana subsidi negara bagi partai, yang jumlah totalnya sampai 1 triliun Rupiah, yang bersumber dari APBN.<sup>64</sup> Selain membantu dukungan finansial buat pengembangan partai, tujuannya juga untuk mengurangi praktek *money politics* dan korupsi politisi opasca-pemilu, karena para caleg terpilih dikejar-kejar tuntutan mengisi kembali kas pribadi dan partai

mereka yang telah habis terpakai selama pemilu legislatif.

Gagasan Mendagri Cahyo Kumolo disambut dengan komentar beragam, pro dan kontra, dan kontroversial ataupun sinis, mulai dari orang partai, anggota parlemen, aktifis LSM, pengamat politik, dan rakyat biasa. Wacana ini sebenarnya konstruktif untuk mulai dapat mengurai dan mengatasi karut-marut politik uang dan merajalelanya praktek korupsi yang dilakukan para politisi selama ini. Namun, karena kinerja partai politik dan anggota DPR yang masih sangat mengecewakan rakyat Indonesia pada umumnya, wacana Mendagri Cahyo Kumolo langsung ditentang, sehingga mati suri sebelum dapat direalisasikan dan sempat berkembang. Absennya (sistem) pelaporan keuangan partai yang akuntabel selama ini dan tidak transparannya laporan sumbangan keuangan yang masuk dari individu anggota partai politik dan kalangan swasta, perusahaan besar (konglomerat), serta dari sumber-sumber non-APBN lainnya adalah beberapa faktor penyebab munculnya segera penolakan itu, terutama dari kalangan pengamat dan LSM yang vokal.<sup>65</sup> Penolakan juga terjadi karena adanya peningkatan drastis dari jumlah total subsidi bagi partai yang diberikan pemerintah sebelumnya, yang mencapai Rp13 miliar lebih.<sup>66</sup>

Karena paham tujuannya untuk mengeliminasi peran dominan atau kontrol modal dari orang atau pemimpin tertentu, dan orang yang berada di balik layar, yang juga memiliki kepentingan atas perkembangan partai politik tersebut, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) sebenarnya mendukung besaran subsidi bagi partai politik lebih dari itu, yakni meningkat 10 kali lipat, tidak Rp108 per satu kursi, tetapi 1.080, sehingga total subsidi bisa mencapai sekitar Rp131 triliun lebih.<sup>67</sup> Karena,

<sup>64</sup> "Cahyo Usul Parpol Disantuni Rp. 1 Trilyun," *Detik.com*, 11 Maret 2015, diakses pada 3 Juni 2015.

<sup>65</sup> Lihat,"10 Masalah Pendanaan Parpol Versi ICW," *Kompas.com*, 12 Maret 2015, diakses pada 3 Juni 2015.

<sup>66</sup> Lihat,"Perludem: Kenaikan Dana Rp. 1 Trilyun untuk Parpol Terlalu Drastis," *Kompas.com*, 12 Maret 2015, diakses pada 3 Juni 2015.

<sup>67</sup> Lihat,"ICW: Idealnya Bantuan untuk Parpol Dinaikkan 10 Kali Lipat," *Kompas.com*, 12 Maret 2015, diakses pada 3 Juni 2015.

selama ini, pemberian subsidi yang transparan itu bersifat legal, tetapi masih sangat terbatas perannya, akibat masih sangat kecil besaran satuan dan total jumlah subsidi. Sebagai akibatnya, peran sumbangan alternatif individu pemilik modal besar dan juga korporasi mereka yang dominan masih sulit diketahui. Jika ini berlangsung terus, tidak akan banyak efeknya dalam mengeliminasi praktek politik uang, korupsi, serta kontrol modal atas setiap kebijakan dan keputusan fraksi di parlemen.

Wacana subsidi negara untuk partai politik dilontarkan Mendagri Cahyo Kumolo pada 11 Maret 2015, ketika Pemerintahan Jokowi baru beberapa bulan berjalan, dan oposisi tengah menguat. Sepintas tawaran ini seperti langkah pragmatis untuk mengurangi tekanan oposisi Koalisi Merah Putih (KMP) yang dikuatirkan dapat menghambat Pemerintahan Jokowi, karena datang dari Cahyo Kumolo, Mendagri, yang juga politikus kawakan PDIP. Melihat tujuannya yang konstruktif untuk mengurangi peran modal individual atau segelintir elit partai dan pemilik modal, usulan peningkatan subsidi negara bagi partai dari Mendagri Cahyo Kumolo, seharusnya didukung, apalagi jika akan ditindaklanjuti pasca-pemilu serentak tahun 2019. Dengan cara ini, sumber pendanaan partai politik semakin meningkat, yang artinya semakin tinggi bantuan subsidi akan semakin baik untuk mengeliminasi politik uang dan kontrol modal atas penyusunan kebijakan publik di parlemen.

Masalah pemberian subsidi negara bagi partai yang lolos ke parlemen sudah diterapkan sejak lama secara legal dan lebih baik di Jerman, yang mengadopsi sistem kapitalisme. Kritik yang muncul kemudian, bahwa solusi tersebut juga memunculkan kartel politik, tidak beralasan kuat. Sebab, selama mekanisme pemilu yang jujur dan adil masih bekerja dengan baik, kepentingan partai politik untuk melanggengkan kekuasaannya dalam pemerintahan dan parlemen melalui koalisi pragmatis demi mempertahankan subsidi keuangan negara, dapat dihindarkan. Sebab, berbeda dengan di Indonesia, belajar dari Jerman, koalisi pragmatis

di sana dibentuk sebelum pemilu, sehingga sulit dikatakan bersifat manipulatif, atau telah berhasil mengecoh kepercayaan dan pilihan konstituen atau pemilih loyalis atau konservatif, yang masih awam pandangan politiknya. Di Jerman, proses politik berlangsung transparan sekali; serta pemilih sudah melek politik dan memiliki kesadaran politik yang tinggi, sehingga setiap langkah manipulatif akan mendatangkan hukuman di akhir koalisi partai dan pada saat pelaksanaan pemilu baru.

Jadi, harus diperhatikan di sini bahwa, selain dukungan pendanaan yang bersumber dari individu anggota partai yang meluas, sebagai pembuktian atas partisipasi, keterlibatan, dan tanggung jawab politik yang kuat dari anggota terhadap partai politik mereka masing-masing, perhatian dan dukungan juga meningkat dari negara, sebagai bukti komitmen negara untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Yang ingin digarisbawahi di sini adalah kontrol modal dalam sistem politik dan kapitalisme yang dianut Jerman telah berhasil ditumpulkan oleh adopsi sistem ekonomi pasar sosial (*Sozialmarktwirtschaft*). Sehingga, upaya menjinakkan kontrol modal dan kapitalisme secara lebih luas adalah, upaya demokratisasi menuju konsolidasi, yang harus dilakukan selain dengan memperluas kepemilikan saham partai, juga dengan meningkatkan pengenaan pajak terhadap para pemilik modal, di satu sisi, dan mengawasi penggunaannya, di sisi lain. Ini, harus disadari, sesungguhnya implementasi ini berhubungan langsung dengan prestasi pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum, yang menjadi prasyarat konsolidasi demokratis.

Adapun prasyarat atau pilar lain, yakni peran media massa yang bebas dan masyarakat sipil yang kuat, yang disinggung di awal esei ini, akan juga tergantung koreksinya pada upaya pemerintah untuk melakukan pengaturan yang baik terhadap kontrol modal di media massa dan juga dalam memperjuangkan dan senantiasa memelihara kebebasan publik. Perbaikan kinerja melalui pengawasan dan tindakan tegas para pemimpin di tingkat atas

terhadap aparat penegak hukum menjadi penting, sehingga konsistensi sikap dan kepastian hukum dapat tercipta. Jerman dan AS adalah dua contoh berbeda yang baik untuk dijadikan pelajaran tentang demokrasi yang sudah terkonsolidasikan. Kedua negara tersebut tidak bisa dikatakan tidak demokratis dalam sistem politik mereka dan sangat kapitalis. Yang pertama, Jerman, lebih kentara dalam mengontrol peran kapital dalam sistem perekonomian nasional dan politik, sedangkan yang kedua, AS, lebih kentara dalam komitmen mempertahankan kebebasan media massa dan kekuatan masyarakat sipil. Realitas yang masih menunjukkan adanya hukum yang tegak dan keadilan sosial yang masih bisa diharapkan di kedua negara itu pulalah yang membuat demokrasi bisa bertahan dan tetap menjadi sebuah pilihan rasional di sana. Padahal, pertumbuhan ekonomi, yang juga menjadi tesis pembelaan para *Indonesianist* asal AS, seperti Donald K. Emerson,<sup>68</sup> selain ekonom India, Amartya Sen, di kedua negara itu dalam beberapa tahun belakangan terus melemah, dan belum juga bangkit.

Jadi, upaya-upaya mensosialiskan<sup>69</sup> sistem ekonomi dan politik di Indonesia harus diperluas atau dilanjutkan. Sehingga, peran yayasan yang bisa berperan, dalam batas tertentu, menyumbang pendanaan partai politik, perlu dilegalisasi, seperti halnya *Konrad Adenauer Stiftung* (KAS) untuk Partai *Christlich Demokratische Union* (CDU) dan *Frederich Ebert Stiftung* (FES) untuk *Christlich Soziale Union* (CSU) di Jerman dan *International Republican Institute* (IRI) untuk Partai Republik dan *National Democratic Institute* (NDI) untuk Partai Demokrat di AS. Alternatif lain, perlu dilakukan perluasan dan peningkatan besaran dana sumbangan anggota partai dan simpatisan, sampai batas yang bisa ditoleransi

dan tidak akan mengganggu keseimbangan dalam kontrol kekuasaan di dalam partai politik dan pengambilan keputusan, serta pembuatan kebijakannya.

Dengan pemberian konsesi ini, partai politik akan menjadi lebih bergairah, karena semakin dirasakan kepemilikannya oleh lebih banyak orang, dan dengan sendirinya menjadi semakin demokratis, karena sumber-sumber keuangan, dan kekuasaannya semakin terdistribusikan. Ini secara logis dapat diartikan, kontrol seorang pemilik modal dalam partai dapat diintervensi oleh pemilik modal lainnya, mengingat pemegang sahamnya semakin banyak dan beragam. Semakin beragam pemegang saham atau kontributor keuangan partai politik akan semakin sehat dan demokratis pengambilan keputusan dalam partai, dan juga kian baik praktek demokrasi yang diperlihatkan parlemen.

Pemberian dana desa dalam bentuk proyek pembangunan, jika sistem bisa dibuat akuntabel secara menyeluruh pelaksanaannya, bisa dikembangkan menjadi cara untuk memperbaiki dan meningkatkan kontrol konstituen atas anggota DPR, yang selama ini dikritisi lemah, karena terputus setelah pemilu legislatif selesai. Sementara, pemberian dana komunikasi dalam bentuk uang langsung ke anggota DPR, yang dapat dibawa dan diberikan mereka ke konstituen dalam berbagai kegiatan kunjungan kerja (kunker) diketahui sebagai sebuah langkah yang sangat menyenangkan dalam meningkatkan keterlibatan konstituen dan masyarakat, terutama simpatisan partai. Tetapi, jika lepas dari sistem pertanggungjawaban keuangan yang baik, para anggota DPR akan mudah tergelincir dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum yang bersifat kegiatan dan perilaku Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sebagai akibatnya, upaya memperluas atau mensosialiskan kepemilikan saham dalam partai untuk mengeliminasi dominasi kontrol dalam partai dan politik di parlemen akan kembali menemui kegagalan dan menjadi sia-sia saja, tidak dapat memenuhi harapan terhadap terobosan yang dilakukan.

<sup>68</sup> Lihat, untuk pembandingan, Donald K. Emerson, "Singapore and the "Asian Values" Debate," *Journal of Democracy*, Volume 6, Number 4, October 1995: 95-105.

<sup>69</sup> Tepatnya mengombinasikan, karena pada dasarnya ideologi negara yang menjadi landasan filosofis politik dan ekonomi pilihan para Bapak Bangsa juga merupakan praktek konvergensi kapitalisme dan sosialisme.

Sementara itu, desakan realisasi pemberian dana aspirasi anggota parlemen yang dititipkan dalam bentuk program-program/proyek-proyek pembangunan ke pemerintah pusat dan daerah, yang berselubung *pork barrel system* yang masih dipraktekkan di Filipina, dan lebih awal diaplikasikan di AS, masih perlu dikaji lebih mendalam dan cermat. Jika tidak, apa yang dikuatirkan LSM dapat terjadi, yakni menciptakan anggaran pembangunan dan alokasi yang tumpang-tindih, sehingga malah memperkuat kondisi kesenjangan sosial yang sudah ada.<sup>70</sup> Karena, jumlah kursi atau daerah pemilihan (dapil, konstituensi) berbeda-beda di setiap propinsi, dengan kondisi dewasa ini, kursi atau dapil di Pulau Jawa jauh lebih banyak dibandingkan dengan di luar Pulau Jawa, khususnya wilayah Indonesia bagian timur.

Kehadiran dana aspirasi yang didikte oleh anggota DPR akan memperkuat politik kartel dan oligarki politik, sedangkan daya kritis anggota DPR akan tumpul, karena kolusi politik akan berlangsung antara pemerintah dan parlemen. Sebab juga, dalam kondisi pembuat dan pengawas kebijakan berada di tangan yang sama, yakni parlemen, fungsi pengawasan akan sulit dijalankan. Sehingga, pelaksanaan fungsi anggaran tidak boleh diartikan parlemen juga sebagai pihak yang membuat dan menentukan anggaran dan proyek di lapangan. Pada prinsipnya, tekad dan upaya keras untuk memperhatikan dan membela aspirasi rakyat di dapil harus memang bersikap adil dan tidak diskriminatif bagi setiap wilayah dan penduduk di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia seharusnya juga telah belajar banyak dari Filipina dan AS dengan *pork barrel system*-nya, yang juga telah menciptakan masalah baru, dalam bentuk tindak pidana korupsi dan pelanggaran sistem keuangan lain, yang telah berakhir di pengadilan dan pada penelesaian sanksi pelengseran dari kursi legislatif.

Sikap partai belakangan yang tidak menyaratkan lagi adanya “mahar” atau yang

<sup>70</sup> Lihat, penilaian LSM yang fokus pada anggaran negara (*Center for Budget Analysis*) dalam, misalnya, *Kompas*, 10 Juni 2015.

dikenal selama ini sebagai “uang perahu” dari para calon kepala daerah, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, sangat maju dan menggembirakan. Ini juga akan mengurangi masalah dari hulu, yang selama ini membuat partai sebagai alat atau modal untuk mencari kekuasaan dan sekaligus uang, yang menjadi penggerak politik uang dan praktek KKN lebih luas. Turun tangannya pemerintah untuk menanggulangi atau menalangi biaya kampanye calon kepala daerah adalah kemajuan yang lebih berarti, untuk mengurangi secara drastis desakan terhadap para calon kepala daerah untuk menjalankan politik uang. Tetapi, di luar ini, bukan berarti politik uang telah berakhir, karena masih dibutuhkan sistem akuntabilitas yang rapi dan praktek *good governance*, serta pengawasan dan ketegasan sikap aparat penegak hukum, media massa, dan masyarakat sipil. Dengan demikian pula, pemilu yang terbuka dan jujur dapat diimplementasikan, demi terciptanya demokrasi yang kokoh dan terkonsolidasi dengan baik.

Tanpa ini semua, dominasi kapital atau kultur uang akan menumbuhkan kondisi alternatif atas munculnya partai-partai politik dan politisi populis, yang belum tentu sepenuhnya pro-rakyat, kecuali di permukaan saja, mengingat oligarki masih berkuasa, belum terkikis, dan malah tengah naik daun,<sup>71</sup> akibat menguatnya kapitalisme dan munculnya neoliberalisme, yang menciptakan struktur neofeodalisme dalam struktur politik dan kekuasaan di Indonesia. Struktur oligarki dalam neofeodalisme ini, jika tidak dapat dikikis, akan membentuk masyarakat semi-kasta, di tengah-tengah euphoria demokrasi dan meningkatnya partisipasi politik, akibat kegagalannya dalam menciptakan mobilitas vertikal, seperti diungkap sosiolog, Iwan Gardono.<sup>72</sup>

Di AS, politik juga sarat dengan kekuatan kapital, sehingga dibutuhkan ongkos yang tinggi untuk sebuah kursi Kongres, apalagi kursi

<sup>71</sup> “Era Politik Populis di Asia Tenggara,” *Kompas*, 9 Juni 2015: 1. Juga, “Politik Populis Terjepit Oligarki,” *Kompas*, 9 Juni 2015: 6.

<sup>72</sup> “Mencegah Masyarakat Semi-kasta,” Orasi Profesor Iwan Gardono, *Kompas*, 11 Juni 2015.

Kepresidenan. Tetapi, mobilitas vertikal masih terbuka, sehingga orang kulit hitam dan dari kalangan masyarakat bawah, seperti Barack Obama, masih bisa terpilih sebagai presiden --peluang yang tersedia tidak hanya bagi dinasti Clinton dan Bush. Sementara, di masa lalu, di Eropa, dan kemudian di Indonesia, sebagai respons atas perkembangan yang buruk era transisi demokratis ini, partai-partai politik dan pemimpin yang populis muncul, dan justru menjerumuskan negara pada terbentuknya rejim-rejim totaliter (kediktatoran) yang telah membawa negara-negara pada Perang Dunia II yang dahsyat dan Perang Dingin yang berkepanjangan. Sebagai konsekuensinya, Indonesia tidak boleh mengarah ke masa depan yang sama, seperti di masa lalu, dan juga dewasa ini, dengan situasi Eropa yang ditandai meningkatnya dukungan dari rakyat terhadap kehadiran partai-partai nasionalis (ekstrim) kanan, yang chauvinis, rasis, dan sangat diskriminatif.

## G. Penutup

Dengan menggunakan pendekatan ekonomi-politik yang telah diintroduksi pada dasawarsa 1980, masalah-masalah klasik dalam transisi demokratis di banyak negara dapat lebih baik, kritis, dan mudah dipahami, tanpa bermaksud menyederhanakan masalah atau bertitik-tolak dari pemikiran yang bersifat konspiratif. Melalui perspektif ini, kegagalan konsolidasi demokratis di negara-negara demokrasi baru dapat lebih jauh dipahami secara komprehensif. Demikian pula terhadap fenomena baru yang muncul di negara demokrasi baru yang mengalami penyimpangan (distorsi) dalam proses transisi demokratisnya.

Fenomena muncul dan menguatnya oligarki yang diiringi dengan tumbuh suburnya kapitalisme dengan neoliberalismenya pasca-rejim otoriter Orde Baru Soeharto di tahun 1998, dan kegagalan transisi demokratis dalam mewujudkan konsolidasi demokratis telah mengingatkan kembali pada pentingnya analisis ekonomi politik terhadap perkembangan demokrasi Indonesia,

khususnya terhadap kekuatiran atas apa yang tengah berlangsung dewasa ini. Pendekatan dan alat analisis yang selalu berangkat dari perspektif intstiusionalisme, yang sudah usang dan tidak lagi dapat diandalkan, karena tidak lagi memperlihatkan relevansinya, sudah harus ditinggalkan. Tanpa itu, analisis politik dan kekuasaan, terutama mengenai perwakilan politik, akan selalu terjebak pada jalan buntu yang lama, dan gagal memahami masalah yang dihadapi dan terus berkembang di Indonesia.

Dari kajian terhadap hasil-hasil riset kontemporer mengenai perkembangan politik dan kekuasaan di Indonesia, tampak bahwa bahan-bahan referensi yang berasal dari para *Indonesianist* Barat belum tentu akurat untuk bisa diandalkan dalam memahami masalah serta mencari dan menawarkan solusi atas permasalahan (perwakilan) politik di Indonesia. Karena, dalam kasus tertentu, analisis mereka terkendala oleh keterbatasan dalam memperoleh dan memahami bahasa dan teks dari sumber data dan informasi lokal yang tersedia. Padahal, hanya dengan dengan pemahaman yang lebih baik terhadap perkembangan politik dan kekuasaan (demokrasi) di Indonesia, maka dapat dicari solusi yang relevan atau tepat, dan tidak lagi parsial, atau bersifat di permukaan, apalagi artifisial.

Dalam penilaian yang lebih spesifik, peran institusi pendidikan dan riset, serta akademisi di belakangnya, apalagi para profesor dan doktor, kaum mandarin, dan intelektual, harus menjauhi diri dari proyek-proyek pekerjaan yang hanya bersifat pencitraan dan semata digerakkan oleh motivasi untuk memperoleh kapital, dan bukan kepentingan obyektif dan panggilan (amanah) untuk memperbaiki sistem yang rusak itu. Dengan kata lain, peran pendidikan tinggi atau universitas, institusi riset, seperti *Center for Election and Political Party* (CEPP) dari FISIP UI yang dewasa ini sangat aktif berupaya memperbaiki citra DPR, serta *think-thank* dan kaum intelektual harus menjauhi kerja yang tidak relevan dalam mengoreksi sistem, terutama dalam membantu memperbaiki kinerja parlemen dan sistem

pendukungnya. Mereka harus menghindari solusi yang tiba-tiba berujung pada rekomendasi pengadaan atau belanja infrastruktur fisik yang mahal dan boros, baik yang dilakukan secara sadar, ataupun tidak telah ditumpangi kepentingan politik para politisi, yang sarat dengan peran dan permainan kapital yang belum tentu relevan dan logis penjelasannya untuk memperbaiki system yang harus dikoreksi itu. Kelompok *think-thank* di DPR seharusnya fokus membantu DPR dalam kerja produktif menghasilkan legislasi yang baik, dan jangan sampai terlibat menjerumuskan parlemen masuk dalam perangkat KKN dan proyek pencitraan yang bersifat di permukaan, sangat keliru, dan tidak menyentuh dan menjawab persoalan dasar.

Dengan demikian, peran sesungguhnya yang harus dimainkan institusi riset dan akademisi adalah membantu terciptanya sistem pendukung yang andal bagi terlaksananya peran dan kerja sebuah parlemen modern. Keterlibatan yang dapat dibenarkan adalah kehadiran mereka yang aktif dan mendalam dalam berbagai kerja legislasi membantu parlemen dapat menghasilkan kebijakan publik yang tepat bagi rakyat banyak, serta mengawasi secara politik jalannya pemerintahan sehari-hari dari dekat dan konsisten, tanpa lengah sedikitpun.

Secara lebih spesifik lagi, untuk menjawab masalah-masalah yang muncul pasca-transisi demokratis di Indonesia, tampak kebutuhan membuat sistem politik dan kekuasaan --demokrasi, di Indonesia-- menjadi lebih berwatak sosialis. Indonesia, tentu, harus mampu keluar membawa dirinya keluar dari perangkat model pembangunan kapitalis, jika tidak ingin terus berada dalam kubangan ketergantungan dan keterbelakangan, seperti negara-negara di Amerika Latin pada dasawarsa 1960. Upaya mensosialiskan sistem politik harus sudah mulai dilakukan dengan mengurangi beban partai politik dan anggotanya sejak sebelum pemilu legislatif (pileg) dan presiden (pilpres) dilaksanakan. Langkah ini dapat mengurangi ketergantungan pada politik uang dan peran kapital yang dominan dan sangat menentukan

elektabilitas calon (caleg dan capres), serta kualitas parlemen dan pemerintah baru yang akan terbentuk.

Sebagai konsekuensinya, solusi yang seharusnya, bukanlah menawarkan pengadaan dana aspirasi yang akan mengakibatkan ketimpangan dan mendukung berkembangnya secara subur praktek-praktek korupsi dan kolusi akibat kontrol kekuasaan politik yang begitu besar dalam penentuannya. Sebab, di negara manapun, jika diterapkan, dalam kondisi pembuat dan pengawas kebijakan adalah pihak yang sama, maka kecenderungan pelanggaran akan besar. Peluang destruktifnya akan semakin besar terjadi dalam negara yang masih tidak transparan proses pembuatan kebijakannya, dan masih sangat rendah kesadarannya terhadap pentingnya implementasi akuntabilitas sistem.

Selanjutnya, proses memperjuangkan kesejahteraan rakyat di dapil haruslah melalui proses deliberasi terbuka dan bukan penjatahan absolut. Sebab, sistem seperti ini hanya akan mendukung terciptanya oligarki kekuasaan, termasuk di daerah-daerah, dan, sebaliknya, menghambat mobilitas vertikal rakyat, dan, secara khusus, kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan. Sistem ini juga akan mendukung gerontokrasi akibat bertahannya orang kuat dalam partai-partai politik, karena kekuatan kapital atau kontrol modal mereka yang besar. Partai mayoritas akan terus menjadi mayoritas, dan yang minoritas sulit berkembang akibat alokasi penentuan pengaliran dana yang subyektif dan keliru, dan bersifat absolut tersebut. Proyek dan kesejahteraan akan menumpuk terus di suatu wilayah yang dapilnya banyak dan sudah maju, seperti di Jawa dan Sumatera, sedangkan wilayah yang dapilnya sedikit dan belum maju akan terus tertinggal kemajuan mereka.

Sementara itu, pelibatan negara dan masyarakat sangat vital dalam menjadikan partai politik sebagai milik dan alat publik, dan tidak berwatak elitis lagi, atau sebagai alat untuk mencari kekuasaan, dan, pada akhirnya, uang! Dalam hal ini, semakin banyak dan dalam publik

terlibat akan semakin baik, karena mereka akan semakin dapat mengendalikan arah dan masa depan partai politik, sistem kepartaian, dan wajah demokrasi yang berkembang di Indonesia. Jadi, upaya mensosialiskan sistem politik adalah solusi absolut terhadap peran dominan kapital dalam politik dan kekuasaan di Indonesia. Tanpa itu, demokrasi Indonesia sulit dapat terkonsolidasikan seperti yang diharapkan para pakar perubahan politik dan demokrasi, seperti Linz dan Stepan, yang sesungguhnya diharapkan pula oleh para pakar pendahulu mereka seperti Dahl, Huntington, Emerson, dan bahkan juga oleh Przeworski dan Sartori. Dan prospeknya, seperti halnya demokrasi di negara demokrasi baru lainnya, akan terus terperangkap dalam wilayah abu-abu, tanpa kejelasan masa depannya, yang malahan akan menjerumuskannya kembali masuk ke dalam sistem lama yang otoriter. Jika kondisi ini yang terus berlangsung, prospek demokrasi Indonesia hanya akan mendukung segera hadirnya kembali kediktatoran politik akibat kembalinya militer ke dalam ranah politik sebagai penentu kebijakan, karena karakternya yang tetap hidup sebagai praetorian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Acemoglu, Daren and James Robinson. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Paperback, Crown Business, 2013
- Ambardi, Kuskridho. *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Penerbit KPG, 2009.
- Almond, Gabriel A. and G. Bingham Powell, Jr. *Comparative Politics Today: A World View*. New York: Harper Collins, 1992.
- Apter, David E. *Pengantar Analisa Politik*. terj. Setiawan Abadi. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Baran, Paul A. *The Political Economy of Development*. Penguin Books, 1974.
- \_\_\_\_\_. *The Political Economy of Growth*. Monthly Review Press; Penguin Books, 1972.
- Bell, Daniel. *The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties*. Harvard University Press, 1960.
- Berstein, Henry (Ed.). *Underdevelopment and Development, the Third World Today*. Penguin Books, 1976.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Bunte, Marco and Andreas Ufen. *Democratization in Post Suharto Indonesia*. Oxon: Routledge, 2009.
- Chalmers, Ian and Vedy R. Hadiz (Eds.), *The Politics of Economic Development in Indonesia: Contending Perspectives*. Routledge: London, 2005.
- Dahl, Robert A. *Modern Political Analysis*. New Delhi: Prentice-Hall of India, 1978.
- Easton, David. *A System Analysis of Political Life*. New York: John Wiley, 1965.
- Feith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Equinox Publishing, 2006.
- Feith, Herbert and Lance Castle. *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Ithaca: Cornell University Press, 1970.
- Frank, Andre Gunder. *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. New York: Monthly Review Press, 1967.
- Fukuyama, Francis. *The End of History and the Last Man*. New York: Free Press, 1992.
- Hadiz, Vedy R. *Dinamika kekuasaan: ekonomi politik Indonesia pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Workers and the State in New Order Indonesia*. London: Rotledge, 1997.

- Huntington, Samuel P. *Political Order in Changing Society*. Yale: Yale University Press, 1968.
- Kunio, Yoshihara. *The Rise of Ersatz Capitalism in South-east Asia*. Manila: Ateneo de Manila University, 1988.
- Lijphart, Arend. *Electoral Systems and Party System*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*. New Haven: Yale University Press, 1984.
- Linz, Juan J. and Alfred Stepan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Washington DC: John Hopkins University Press, 1996.
- Linz, Juan and Arturo Velenzuela (Eds). *The Failure of Presidential Democracy*, Johns Hopkins University Press, 1994;
- Macintyre, Andrew. *Business and Politics in Indonesia*, Syufney: Allen & Unwinn, 1991.
- Mainwaring, Scott. Presidentialism, Multipartyism, and Democracy: The Difficult Combination, <http://cps.sagepub.com>, *Comparative Political Studies*, 26, 1993.
- Manwaring, Scott and Matthew Soberg Shugart. *Presidentialism and Democracy in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Merkel, Wolfgang *et al*, *Defekte Demokratie, Band I: Theorie*. Opladen: Leske & Budrich, 2003: 113-116.
- Mietzner, Marcus and Edward Aspinall (eds.). *Problems of Democratization in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2010.
- Rahardjo, M. Dawam. *Esei-esei Ekonomi-Politik*. Jakarta, LP3ES, 1985.
- Robison, Richard. *The Rise of Capital*. Sydney. Allen & Unwinn, 1986.
- Sen, Amartya. *The Idea of Justice*. UK: Allen Lane, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Poverty and Famine*. Oxford, UK: Oxford University Press, 1981.
- Sherlock, Stephen. *The Indonesian Parliament after Two Elections: What Has Really Changed?* Canberra: CDI, 2007.
- Tocqueville, Alexis de. *Democracy in America*, translated by Henry Reeve, 1840.
- Wallerstein, Immanuel. *World System Analysis*. Durham, Duke University Press, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Modern Worlds System*. New York: Academic Press, 1976.
- Winters, Jeffrey A. *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

#### **Jurnal/Disertasi/Hasil Riset/Makalah**

- Emerson, Donald K. "Singapore and the "Asian Values" Debate." *Journal of Democracy*, Volume 6, Number 4, October 1995: 95-105.
- Hadiz, Vedy R. "The Rise of Capital and the Necessity of Political Economy." *Journal of Contemporary Asia*, 05/2013; 43(2)/*Indonesia*, 01/2013.
- Hadiz, Vedy R. and Richard Robison, "The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia." *Indonesia*, Vol. 96, October 2013: 35-58.
- Haris, Syamsuddin. "Sistem Proporsional yang Disempurnakan bagi Pemilu 1999." kertas kerja pada Dialog Nasional Agenda Pemilu: Visi, Tantangan, dan Prospek, di UI, 20-21 Juli 1998.
- Legowo, Tomy A. "Disparitas Hubungan Parlemen dan Aspirasi Rakyat." kertas kerja, 2011.
- \_\_\_\_\_. "Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik." *Jurnal Jentera*, Edisi 16, Tahun IV, April-Juni 2007.
- Lev, Daniel S. "Political Parties in Indonesia." *Journal of Southeast Asian History*. Singapore: March, 1967.

- “Reformasi Sistem Perwakilan Politik di Indonesia.” makalah presentasi, laporan penelitian, Jakarta: Puskapol FISIP-UI, 2015.
- Sanit, Arbi. “Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia.” makalah presentasi di Jurusan Ilmu Politik UNI, Jakarta: Puskapol UI, 2015.
- Tanjung, Akbar. “Partai Golkar dalam Pergolakan Politik Era Reformasi: Tantangan dan Respons.” disertasi doktoral, Yogyakarta: Pasca Sarjana fisipol UGM, 2009.
- Ufen, Andreas. “Party systems, Critical Junctures, and Cleavages in Southeast Asia.” *Asian Survey*, Volume, 01, 2012, 52, No.3: 441-464.
- \_\_\_\_\_. “From aliran to dealignment: political parties in post-Suharto Indonesia.” *South East Asia Research*, 16, 2008, No.1: 5-41.
- Suratkabar/Portal**
- “Cahyo Usul Parpol Disantuni Rp. 1 Trilyun.” *Detik.com*, 11 Maret 2015, diakses pada 3 Juni 2015.
- “Era Politik Populis di Asia Tenggara.” *Kompas*, 9 Juni 2015: 1.
- ”10 Masalah Pendanaan Parpol Versi ICW,” *Kompas.com*, 12 Maret 2015, diakses pada 3 Juni 2015.
- ICW: Idealnya Bantuan untuk Parpol Dinaikkan 10 Kali Lipat.” *Kompas online*, 12 Maret 2015, diakses pada 3 Juni 2015.
- Keliat, Makmur. “Pelebagaan Ekonomi-Politik,” *Kompas*, 14 Maret 2016: 6.
- Kompas*, 10 Juni 2015: 1, 6-7.
- Lee, Antony “Indeks Negara Rentan: Parpol, Korupsi, dan Penguasaan Elite,” *Kompas*, 5 Maret 2016: 4. “Mencegah Masyarakat Semi-kasta.” Orasi Profesor Iwan Gardono, *Kompas*, 11 Juni 2015.
- ”Perludem: Kenaikan Dana Rp. 1 Trilyun untuk Parpol Terlalu Drastis.” *Kompas.com*, 12 Maret 2015, diakses pada 3 Juni 2015.
- “Politik Populis Terjepit Oligarki.” *Kompas*, 9 Juni 2015: 6.
- Rahardjo, M. Dawam. ”Pancasila dan Akhir Ideologi.” *Kompas*, 22 Juni 2013.
- Salahudin, Asep. ”Komodifikasi Politik Wong Cilik.” *Media Indonesia*, 22 Maret 2016: 6.
- Siregar, Herman. ”Bahtera Partai Golkar Terancam Karam.” 3 Mei 2009.
- Susetyo, Benny. ”Gagal Membaca Zaman.” *Kompas*, 21 Maret 2016: 7.
- Tanuwidjaja, Sunny. ”Multipartai dan Presidensialisme.” *Kompas.com*, 11 Juli 2008, diakses pada 23 Juni 2015.